



2025

Laporan Kinerja

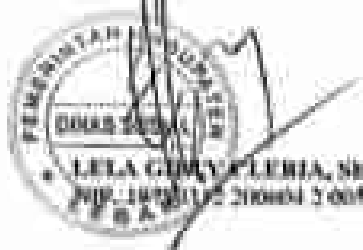
Dinas Sosial Kabupaten Lebah
Tahun 2026

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKJIP Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKJIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, Dinas Sosial Kabupaten Lebak tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2029. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan keseriusan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Lebak, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan keagungan pencapaian strategi berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan perwujudan LKJIP ini dapat menjadikan bahan referensi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif dan berkelanjutan dimasa mendatang.

PA KOPALA DINAS SOSIAL KAB. LEBAK



Ringkasan Eksekutif

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja (LKj), Dinas Sosial Kabupaten Lebak berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan serta bentuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tugas dan amanat untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lebak telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial tahun 2024. Laporan ini juga sekaligus bentuk evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil rekomendasi revisi tahun Laporan Kinerja Tahun 2024, dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat menyajikan indikator yang lebih akurat. Rencana capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lebak berlandaskan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lebak tahun 2025 berkategori **Tinggi** dengan rata-rata capaian **76,29%**.
2. Sasaran strategis ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama, dengan tingkat capaian strategis:
 - **Sasaran 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel** mencapai **49,77%** dengan kategori **Sangat Rendah**.
 - **Sasaran 2. Meningkatnya kemapanaan sosial yang inklusif** mencapai **102,81%** dengan kategori **Sangat Tinggi**.

Capaian kinerja keuangan berkategori **Efektif** dengan realisasi serapan anggaran sebesar **96,14%** atau Rp 11.223.919.920,00 dan target pagu Rp 11.778.490.236,00.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Gambaran Umum	1
1.1.1	Struktur Organisasi dan Cascading Kinerja	2
1.1.2	Tugas, Fungsi dan Pola Jabatan	4
1.1.3	Sumber Daya Manusia	9
1.2	Peran Strategis	11
1.3	Isu Strategis	12
1.4	Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025	16
1.5	Sistematika Penulisan	17
BAB 2	PERENCANAAN KINERJA	19
2.1	Rencana Strategis	19
2.1.1	Visi dan Misi	19
2.1.2	Tujuan dan Sasaran	21
2.1.3	Strategi, Arah Kebijakan dan Program	21
2.1.4	Indikator Kinerja Utama	34
2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	36
BAB 3	AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1	Capaian Kinerja Organisasi	38
3.1.1	Pengukuran Kinerja	38
3.1.2	Analisis Capaian Kinerja	46
		iii

1.1.2.1	Sasaran 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	46
1.1.2.2	Sasaran 2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	53
1.1.3	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	109
3.2	Capaian Anggaran	111
3.3	Capaian Kinerja Lintas	116
BAB 4	PENUTUP	118
4.1	Kesimpulan	118
4.2	Langkah Perbaikan Kinerja	118
LAMPIRAN		

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 1.2	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	17
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lebak Dilakukan Dengan RPMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029	21
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029	22
Tabel 2.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, serta Program Pendukung RPMD Kabupaten Lebak dan Rencana Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029	24
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2025	29
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lebak	35
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Murni	36
Tabel 2.7	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	37
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	39
Tabel 3.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan 2025	39
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) per Triwulan Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2025	41
Tabel 3.4	Perbandingan Target IKU Tahun 2024 dan 2025 dengan Target Akhir Rencana Dinas Sosial Kabupaten Lebak	43
Tabel 3.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1	47
Tabel 3.6	Pengukuran Indikator Kinerja Program Peningkat Umatan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48
Tabel 3.7	Capaian Indikator Pendukung Program Peningkat Umatan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50
Tabel 3.8	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2	54
Tabel 3.9	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lebak Tahun 2021-2025	54
Tabel 3.10	Pengukuran Indikator Kinerja Program Peningkat Umatan	56

Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Program Pembudayaan Sosial Tahun 2024 dan 2025	57
Tabel 3.12	Tenaga Kesejahteraan Sosial Keselamatan dan Relawan Sosial Tahun 2025	58
Tabel 3.13	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Tahun 2025	61
Tabel 3.14	Pengukuran Indikator Kinerja Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	64
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Tahun 2024 dan 2025	65
Tabel 3.16	Fasilitas Warga Negara Migran yang Mengalami Tindak Kekerasan Tahun 2025	66
Tabel 3.17	Pengukuran Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial	69
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2024 dan 2025	69
Tabel 3.19	Bantuan Permukiman bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Lainnya Tahun 2025	72
Tabel 3.20	Bantuan Samping bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Lainnya Tahun 2025	73
Tabel 3.21	Data Layanan Penelusuran Keluarga dan Reunifikasi Tahun 2025	77
Tabel 3.22	Pembinaan Layanan Data dan Pengabdian Untuk SPM Bidang Sosial Tahun 2025	80
Tabel 3.23	Bantuan Permukiman untuk PPKS Lainnya Tahun 2025	83
Tabel 3.24	Penyuluhan Samping Tahun 2025	84
Tabel 3.25	Pengukuran Indikator Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	84
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2024 dan 2025	89
Tabel 3.27	Rekapitulasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DISEN) Kabupaten Lebak Tahun 2025	91

Tabel 3.28	Rekapitulasi Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2025	93
Tabel 3.29	Fasilitasi Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga Tahun 2025	100
Tabel 3.30	Pengukuran Indikator Kinerja Program Penanganan Bencana	103
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Program Penanganan Bencana Tahun 2024 dan 2025	103
Tabel 3.32	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Penerima Bantuan Permukiman KabupatenLebak Tahun 2025	104
Tabel 3.33	Rekapitulasi Penyumbang Dana Dana Penyesuaian Sandang Tahun 2025	106
Tabel 3.34	Pengukuran Indikator Kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	108
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	108
Tabel 3.36	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	110
Tabel 3.37	Alokasi Anggaran Belanja per Satuan Strategi Tahun 2024 dan Tahun 2025	111
Tabel 3.38	Target dan Realisasi Anggaran Belanja TA 2024 dan 2025	112
Tabel 3.39	Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 dan 2025	117

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	3
Gambar 1.2	Coaching Kinerja	4

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Latar Belakang Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2025	9
Grafik 3.1	Perkembangan Capaian Nilai SAKIP Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2021-2024	49
Grafik 3.2	Perkembangan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2021-2025	50
Grafik 3.3	Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan	55
Grafik 3.4	Perkembangan Capaian Persentase Pelaksanaan Pemangunan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun 2021-2025	79
Grafik 3.5	Perkembangan Capaian Indikator Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial Tahun 2021-2025	85
Grafik 3.6	Perkembangan Target dan Pencyerapan Anggaran Belanja Tahun 2021-2025	116

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Gambaran Umum

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Pemerintah Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Pemerintah Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Sosial Kabupaten Lebak sebagai salah satu instansi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditapkan untuk dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2025, merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dilakukan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Pemajak Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Dengan diisuminya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2023, diharapkan dapat:

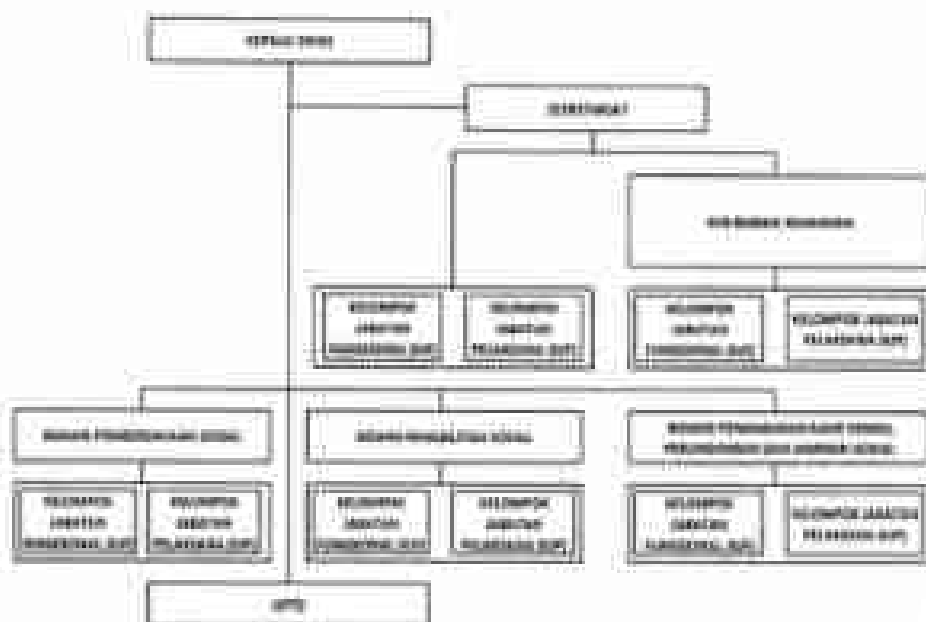
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak.
2. Mendukung Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Membetikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1.1. Struktur Organisasi dan Cascading Kinerja

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, maka Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ditragikan melalui Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lebak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Lebak memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

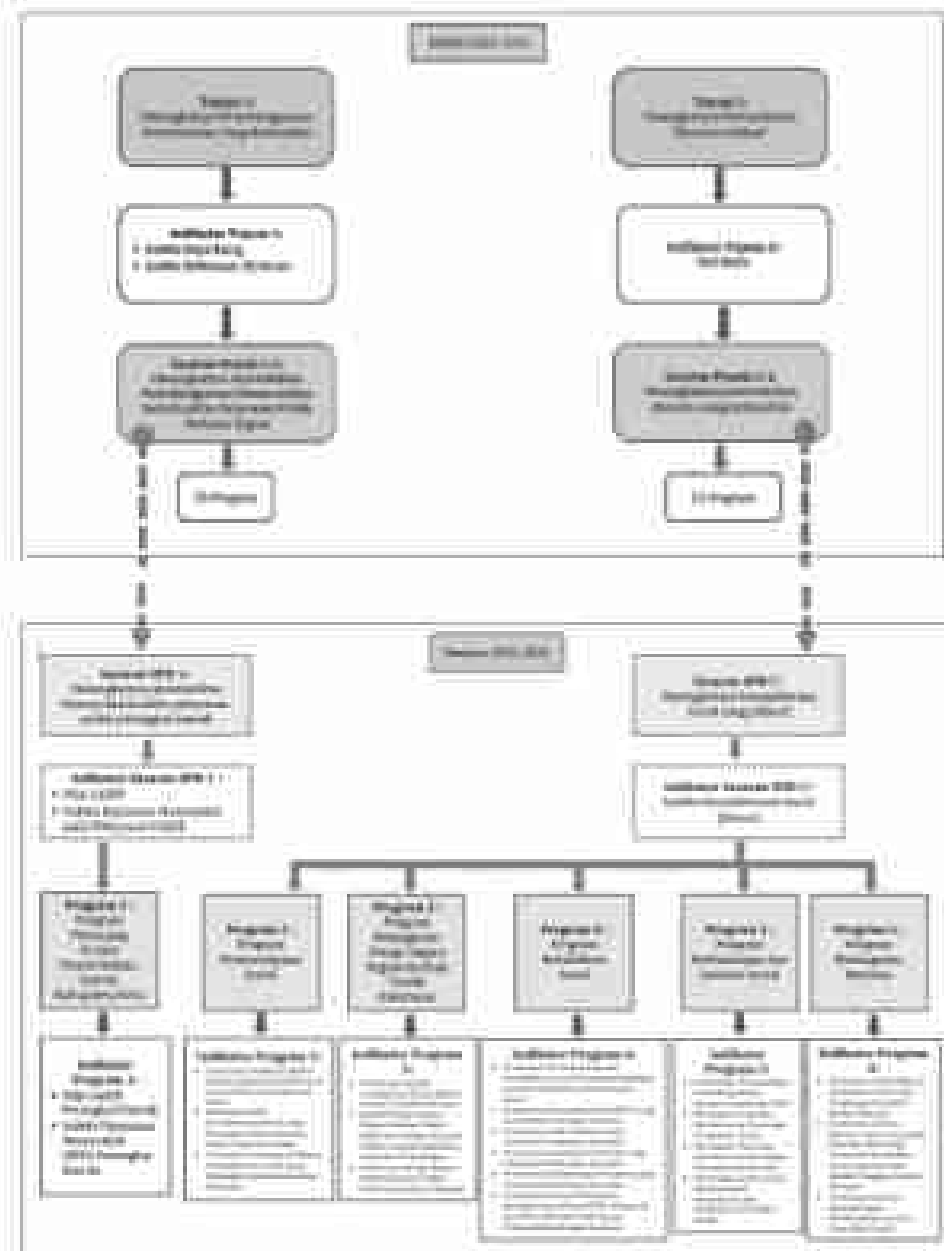
Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2023

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibenahi untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029. Dinas Sosial Kabupaten Lebak dibenahi dengan skema kinerja sebagai berikut.

Gambar 1.2
Curriculum Kinerja



1.1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lebak, mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah pada bidang urusan sosial.

Masing-masing komponen dalam struktur organisasi tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi utama/urutan dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang sosial;
- c. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang sosial;
- d. Pengelolaan administrasi kekehumasan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan operasional perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup Dinas;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi subbagian; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretaris membawahi:

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. Kelompok Jabatan Pelaksana.

3) Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemberdayaan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan pemberdayaan sosial;
- b. Pengelolaan urusan pemberdayaan sosial;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan sosial; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Kelompok Jabatan Pelaksana.

4) Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan rehabilitasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan rehabilitasi sosial;
- b. Pengelolaan urusan rehabilitasi sosial;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan rehabilitasi sosial; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Kelompok Jabatan Pelaksana

5) Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan operasional urusan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Pengendalian urusan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- b. Kelompok Jabatan Pelaksana

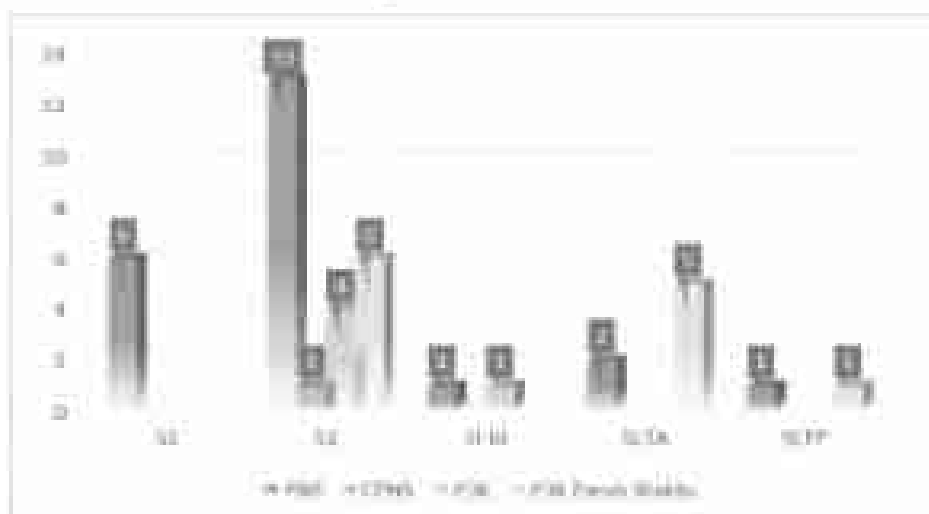
Secara pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lahat, dibagi habis ke dalam jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 29 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lahat, dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Dinas		
2. Sekretaris	Di bawah Sekretaris 1. Pemusatan Ahli Muda 2. Analis Ekspertise Muda	Di bawah Sekretaris 1. Pengadministrasi Surat: Pemusatan 2. Pemusatan 3. Prata Komputer 4. Prata Komputer Terampil 5. Operator Layanan Operasional
Kepala Sub Bagian Keuangan		Di bawah Kepala Sub Bagian Keuangan 1. Pemilih Teknis Kebijakan 2. Pengadministrasi Perkantoran
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Di bawah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 1. Penggerak Swadaya Masyarakat 2. Pekerja Sosial 3. Penyuluh Sosial	Di bawah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial 1. Pemilih Teknis Kebijakan 2. Prata Layanan Operasional
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Di bawah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 1. Penggerak Swadaya Masyarakat 2. Pekerja Sosial	Di bawah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 1. Prata Layanan Operasional 2. Operator Layanan Operasional 3. Pengelola Umum Operasional
5. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Di bawah Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Penggerak Swadaya Masyarakat 2. Pekerja Sosial 3. Penyuluh Sosial	Di bawah Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial 1. Analis Masalah Sosial 2. Prata Layanan Operasional

1.1.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur pada Dinas Sosial pada tahun 2025 memiliki jumlah pegawai sebanyak 41 pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 29 orang, CPNS sebanyak 3 orang, PPK sebanyak 5 orang dan PPK Paruh Waktu sebanyak 12 orang. Keseluruhan sumber daya manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial Kabupaten Lebak tergambar pada grafik berikut.

Grafik 1.1
Latar Belakang Pendidikan Dinas Sosial
Kabupaten Lebak Tahun 2025



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Dinas Sosial Perdagangan Kabupaten Lebak memiliki pendidikan terakhir Strata I/Sarjana. Jika dilihat secara bobotnya 58,54% dari jumlah pegawai berpendidikan terakhir Strata I/Sarjana, 17,07% berpendidikan terakhir SLTA, 14,63% berpendidikan terakhir Peca Sarjana/S2, 4,88% berpendidikan terakhir Sarjana Muda/D-III dan 4,88% berpendidikan terakhir SLTP.

Berikut ini jumlah aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lebak berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Urutan	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1.	Berdasarkan Golongan			
	Golongan IVa	1	1	
	Golongan IVb	1	1	
	Golongan IVc	4	2	2
	Golongan III/d	4	2	2
	Golongan III/c	3	1	2
	Golongan III/b	2	2	
	Golongan III/a	6	1	2
	Golongan II/b	2	2	
	Golongan II/a	1	1	
	Golongan Ia	1	1	
	IX	4	3	1
	VII	1	1	
	PK-Paruh Waktu	12	6	6
Jumlah	41	25	16	
2.	Berdasarkan Pendidikan			
	Pada Sarjana (S2)	6	5	1
	Sarjana (S1)	24	13	11
	D-III	2	1	1
	SLTA	3	4	2
	SLTP	2	2	
Jumlah	41	25	16	
3.	Berdasarkan Jabatan			
	Kepala Dinas	1	1	
	Sekretaris	1	1	
	Kepala Bidang	3	1	2
	Kepala Sub Bidang	1		1
	Jabatan Fungsional	13	8	5
	Jabatan Pelaksana	22	14	8
Jumlah	41	25	16	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat terdiri dari:

- (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial
 - a. Pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 145 orang
 - b. Pendamping sosial anak sebanyak 2 orang

- c. Penyandang sosial penyandang disabilitas sebanyak 5 orang
- 2) Pekerja Sosial sebanyak 4 orang
- 3) Relawan Sosial
 - a. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 1.725 orang
 - b. Karang Taruna sebanyak 774 orang
 - c. Tenaga Pelopor Pedamaian sebanyak 10 orang
 - d. Timba Siaga Bencana (Tigasei) sebanyak 224 orang
 - e. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 20 orang
 - f. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sebanyak 148 orang
 - g. Lembaga Komunitas Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebanyak 1 lembaga
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 45 lembaga
 - i. Penyuluh Sosial sebanyak 1 orang

1.2. Peran Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Lebak mempunyai peran strategis, yaitu mewujudkan hak-hak dasar masyarakat guna mencapai taraf kesejahteraan sosial. Mewujudkan hak-hak dasar masyarakat khususnya terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi sasaran strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Adapun strategi Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial;
2. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial;
3. Meningkatkan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kapasitas; dan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lebak.

Peran strategis Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam rangka mewujudkan sasaran strategis, antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial (makanan) untuk memulihkan (dan mengembangkan) kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara individu, motivasi, kerensif baik dalam keluarga, masyarakat maupun pada sosial.

2. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:
 - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan
 - b. Meningkatkan peran serta lembaga kesejahteraan sosial dan/atau perorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, pengujian nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan/atau pemberian bantuan sosial.
3. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan Sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial diberikan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
4. Jaminan Sosial adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tanggungan berkelanjutan untuk:
 - a. Menjamin tidak miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas yang mengalami ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan
 - b. Menghargai pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

1.3. **Ibu Strategis**

Eksistensi sebuah instansi bergantung pada sejauh mana instansi tersebut mampu mengidentifikasi dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dinas Sosial Kabupaten Lebak merupakan OPD yang menangani permasalahan sosial, dengan demikian isu strategis banyak berkaitan dengan permasalahan sosial, antara lain:

1. **Kemiskinan**

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat sebagaimana amanat UU Nomor 13 Tahun

2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial baik secara individu untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.

Faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam menanggulangi peran sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah masalah sosial yang dilidapinya) dan faktor eksternal (ketipikan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesenjangan dan ketidakeadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis).

Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, maka masalah kemiskinan yang dialaminya menjadi semakin sulit ditangani, tidak ada kemandirian/pasali/patah semangat dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan asosial, antisosial, perilaku destruktif atau terlibat dalam perilaku kriminal seperti pencurian, perdagangan ilegal narkoba, pelacuran, perdagangan manusia dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lain yang pada akhirnya dapat mengganggu keberfungsian sosial manusia.

2. Kecacatan

Kecacatan didefinisikan sebagai keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama atau kondisi abnormal fungsi struktur utama, perilaku maupun fungsi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keefektifan aktivitas fisik, kewirausahaan dan harga diri yang berpengaruh dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersosial, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lainnya dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreatasi sebagaimana orang-orang yang tidak

cemas tidak dapat terpecah. Masalah kecemasan akan semakin berat apabila disertai dengan masalah kemiskinan, keterlambatan dan ketertinggalan.

3. Keterlambatan Sosial

Keterlambatan disini dimaksudkan sebagai pengabaian/porelambatan karena berada di dalam keluarga tidak mampu/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sepakat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu pula lanjut usia, perlu dijaga dan diasah melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberikan kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

Diantara penyebab keterlambatan adalah adanya faktor kemiskinan dalam keluarga, pertumbuhan pasangan suami istri, hasil hubungan tanpa perencanaan (pergaulan bebas) dan lain sebagainya.

4. Ketumuhan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketumuhan memberikan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yaitu terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, kognitif dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Kegagalan seseorang menjalankan fungsi sosialnya menyebabkan seseorang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Ketumuhan sosial selain disebabkan masalah kemiskinan juga merupakan akibat dari ketidakmampuan kelompok tersebut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga keberfungsian sosial mereka terganggu. Distres permasalahan lainnya adalah semakin marak dan terbukanya penyimpangan perilaku seks komersial. Perilaku ini terjadi pada semua tingkat usia, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi. Kecenderungan ini mendorong akibat terdorong oleh gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pola hidup dan penghasilan yang mereka dapatkan. Kehancuran ekososi telah memperlebar jurang antara masyarakat mampu dan tidak mampu, dan mereka yang tidak mampu berusaha untuk tetap hidup walau dengan cara tidak layak. Mereka hidup menggelayang/mengemis, menjual diri, bahkan terjerumus menggunakan narkoba karena ketidakmampuannya, dan tidak adanya pertumbuhan konsep diri dan kepekaannya. Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami masalah dan

memerlukan pertolongan yang artinya tidak semata-mata fisik akan tetapi lebih kepada pertolongan yang bersifat pembinaan mental/besial.

Pemerintah perlu memperhatikan secara sungguh-sungguh agar tidak hanya semata-mata memperhatikan pembangunan fisik, akan tetapi lebih memandang manusia sebagai pelaku/subjek yang akan menggerakkan laju pertumbuhan ke arah masyarakat yang berkeadilan/keadilan sosial.

5. Keterpencilan/Daerah Tertinggal

Masalah isolasi atau yaitu keterpencilan dan ketertinggalan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh 1.408 KK komunitas adat terpencil yang berada di 5 kecamatan yaitu Cibeban, Cirintan, Cutugbitung, Leluwidamar dan Sobang. Keteringgalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait dengan HAM, lingkungan, integrasi sosial dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah.

Komunitas Adat Terpencil ini belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan, baik karena adanya alam maupun isolasi sosial/budaya. Dengan demikian, mereka belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial/dasar. Kemudian ini dapat menghambat proses-pemertanian pembangunan dan hasil-hasilnya menuju ke arah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam melakukan pemberdayaan KAT meliputi pemberian perlindungan dan jaminan sosial.

Dengan demikian, hasil yang dicapai dari jumlah populasi KAT yang terdapat di 5 Kecamatan di Kabupaten Lebak masih dituntutkan kerja keras untuk mendorong pemberdayaan KAT dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 pada program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil kesesuaiannya telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten.

6. Korban Bencana

Kabupaten Lebak dengan letak geografis, keadaan geografis dan litografisnya dapat menimbulkan kerawanan terhadap bencana alam. Sebagai daerah rawan bencana, diperlukan sistem perlindungan sosial yang adaptif dengan mengintegrasikan 3 aspek, yaitu perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.

UU Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan bencana pada pasal 1 menyatakan bahwa bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, kerumuhan dan teror. Dalam pertimbangan perlindungan korban bencana

sosial meliputi kebakaran hutan, kebakaran pasar dan permukiman penduduk, orang terlantar (seluruhnya masyarakat yang tidak memiliki biaya pulang ke daerah asalnya atau kejadian luar biasa (walah) yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Lebak juga memiliki tugas menangani permasalahan sosial yang berkaitan dengan tindak kekerasan, tindak kekerasan pada anak dan pekerja migran.

Dampak itu, penanganan korban bencana alam, bencana sosial, tindak kekerasan pekerja migran bermasalah, eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, perlu dilakukan secara profesional, sistematis dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.

7. Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha

Dinas Sosial Kabupaten Lebak memiliki peran kunci sebagai fasilitator dan regulator dalam menjembatani kelembagaan sosial (Lembaga Kesejahteraan Sosial, organisasi masyarakat sipil, Karang Taruna dan sebagainya) dan dunia (perusahaan swasta, BL/MENBT/MN, UMKM) untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

Banyak LKS atau organisasi sosial di daerah, terutama yang berskala kecil, masih memiliki keterbatasan dalam hal kapabilitas manajerial, perencanaan program, pelaporan keuangan dan inovasi. Hal ini menyulitkan mereka untuk menarik kepercayaan dari dunia usaha yang menuntut profesionalisme dan akuntabilitas tinggi. Selain itu, program-program yang ditawarkan oleh kelembagaan sosial terkadang belum sepenuhnya selaras dengan strategi CSR atau kebutuhan bisnis dunia usaha. Ada kecenderungan LKS mengajukan proposal berdasarkan kebutuhan internal mereka, bukan berdasarkan potensi sinergi yang dapat saling menguntungkan. Oleh karenanya, dunia usaha sering kesulitan menemukan LKS yang kredibel dan sesuai dengan fokus CSR mereka.

1.4 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025

Beberapa catatan terkait kondisi implementasi SAKIP di Dinas Sosial Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Surat Inspektor Inspektori Kabupaten Lebak Nomor 700/242/LH/TTDA/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi: 1. Dokumen Laporan Kinerja belum direvisi secara internal 2. Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkapkan sejarah tentang pencapaian kinerja 3. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Memadukannya Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kabupaten Lebak telah: Tindak lanjut: Dokumen Laporan Kinerja telah dilakukan revisi dengan menambahkan Tim Kerja Laporan Kinerja yang tugasnya melaksanakan revisi terkait format, mekanisme penyusunan dan substansi Laporan Kinerja Penyusunan LKJ tahun 2025 telah dilakukan perbaikan dengan mengungkapkan sejarah tentang pencapaian kinerja Penyusunan LKJ tahun 2025 telah dilakukan perbaikan dengan menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

1.5. Sistematisa Pemisahan

LKJ Dinas Sosial Kabupaten Lebak disusun berdasarkan sistematisa penyajian sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta IKU Dinas Sosial Kabupaten Lebak.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan hasil pengukuran kinerja yang terdiri dari capaian kinerja organisasi dan capaian keuangan Dinas Sosial Kabupaten Leksah Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaian serta langkah solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan bersinergi, selaras dengan visi, misi, potensi dan peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Lebak dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang akan timbul.

Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 diwujudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan daerah, serta mewujudkan ketepatan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

2.1.1. Visi dan Misi

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPMD Kabupaten Lebak merupakan implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan tujuan akhir selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, serta budaya yang hidup dalam masyarakat. Visi Bupati Lebak tahun 2025-2029, yaitu *"Mewujudkan Kabupaten Lebak yang Bahag (Bahwa, Unggul, Hebat, Aman dan Yakin)"* dengan penjabaran maksi dan visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rakyat mengandung makna rasa kebersamaan, utuh atau persatuan, kolaborasi, rasba bersama dan nilai-nilai luhur. Konsep ini menekankan pentingnya kerjasama, saling membantu dan menghargai perbedaan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Unggul mengandung makna upaya maksimal, *ambitious* atau jayating, generasi emas, *growth* atau pertumbuhan, nilai, *leadership* atau kepemimpinan. Konsep ini menekankan pentingnya melakukan upaya maksimal untuk meningkatkan daya saing daerah.

Hebat mengandung makna hidup sehat, esikasi kesehatan, gerakan kebugaran, aksesibilitas dan rehabilitasi.

Aman mengandung makna amanah, mitigasi bencana, aplikasi kearifan dan *networked community*.

Yakin mengandung makna yakin, nilai kebersamaan, arah yang jelas, konsistensi, inovasi.

Upaya mewujudkan visi diungkap melalui lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berbasis digitalisasi;
2. Meningkatkan kinerja ekonomi daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan bertanggung tinggi nilai kesetaraan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas dan terintegrasi dengan memperhatikan aspek tata ruang; dan
5. Mempertahankan harmonisasi lingkungan dengan memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Apabila disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah, maka yang perlu dijabarkan lebih lanjut terkait kata kunci berbasis potensi lokal. Sedangkan misi Kepala Daerah yang harus diimplementasikan berdasarkan tugas dan wewenang Dinas Sosial adalah:

Misi 1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berbasis digitalisasi

Misi 2

Meningkatkan kinerja ekonomi daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 yang diperintahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam memanggulangi permasalahan sosial dan penanganan kerentanan periode 2025-2029 terinci sebagai berikut.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lebak
Dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029

No.	Misi	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD
1.	Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik berbasis digitalisasi	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
2.	Misi 2. Meningkatkan efisiensi ekonomi daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif

Sumber: Rencana Dinas Sosial Kab. Lebak, 2025-2029

2.1.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran lima tahun ke depan, dibutuhkan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lebak yang mengacu kepada visi dan misi Kabupaten Lebak. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk penentuan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lebak. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lebak selama periode lima tahun disajikan sebagai berikut berikut.

Tabel 3.2
Strategi dan Arah Kebijakan
Rencana Dinas Sosial Kabupaten Labak Tahun 2018-2020

Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian 1.2. Meningkatkan penghematan keuangan 1.3. Meningkatkan pelayanan publik perangkat daerah
2. Meningkatnya pelayanan, kemampuan Penerima dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penguatan fungsi pemeliharaan sosial	2.1. Mengoptimalkan pengumpulan antrian daerah Kabupaten/Kota 2.2. Mengoptimalkan dan memberdayakan Penerima dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 2.3. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial kepada PPKS 2.4. Peningkatan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui bantuan sosial kewirausahaan 2.5. Meningkatkan pemeliharaan Taman Muliwa Pahlawan Kabupaten/Kota
3. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial	3.1. Fasilitas pemilangan warga migran korban tindak kekerasan ke daerah asal 3.2. Pemenuhan standar mutu dan kualitas layanan SPM bidang sosial 3.3. Mengoptimalkan pemberian pelayanan, rehabilitasi, pembinaan dan bantuan sosial dasar bagi PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Narkoba di luar panti sosial
4. Tersedianya pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan korban bencana alam dan sosial sesuai standar waktu	4.1. Meningkatkan kualitas pelayanan data kemasokan cakupan Kabupaten / Kota 4.2. Meningkatkan pelayanan dasar KPM melalui bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi pemudik miskin dan rentan 4.3. Peningkatan kemandirian bagi keluarga miskin dan rentan melalui bantuan sosial LEP

Strategi

Arah Kebijakan

- 4.4. Mengoptimalkan pemberian pelayanan cepat tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah.

Sumber: *Widyia (Dina) Dinda Ayu Cahya*, 2022-2023.

Kerangka antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program pendukung tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, serta Program Pendukung
 RPJMD Kabupaten Lebak dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029

VISI : Menunjukkan Kabupaten Lebak yang RUKHAY (Bakus, Unggul, Hagar, Aman dan Yakin)

MISI 1 : Menunjukkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik Berbasis Digitalisasi

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	1.1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	1. Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan, penganggaran dan pengawalan 1.2. Meningkatkan pengelolaan keuangan 1.3. Meningkatkan pelayanan publik perangkat daerah	Program Peningkat Utusan Perwakilan Daerah Kabupaten / Kota

MISI 2 : Meningkatkan Hilliness Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal	2.1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	2. Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif	2. Meningkatkan pelayanan, kemiskinan, Pemuda dan Sumber Sosial Kesejahteraan Sosial (PKS), serta pengaman fungsi pembangunan sosial	2.1. Mengoptimalkan pengumpulan sumbuhan daerah Kabupaten/Kota 2.2. Mengoptimalkan dan memberdayakan Pemuda dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PKS) 2.3. Meningkatkan peran dan fungsi keterbaguan sosial kemasyarakatan dalam meningkatkan jangkauan pelayanan sosial kepada PKS 2.4. Peningkatan kemandirian Pemuda Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) melalui bantuan sosial kewirausahaan 2.5. Meningkatkan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Program Pembangunan Sosial Program Pengabdian Taman Makam Pahlawan

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arahi Kebijakan	Program Pendukung
				3. Meningkatkan Penanganan Rehabilitasi Sosial	3.1. Peningkatan penulangan warga migran korban tindak kekerasan ke daerah asal 3.2. Peningkatan standar mutu dan kualitas layanan SPK hilang sosial 3.3. Mengoptimalkan pemberian pelayanan, rehabilitasi, pembinaan dan bantuan sosial dasar bagi PPKS terpadu korban HIV/AIDS dan Narkoba dan lain lain sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penganganan Warga Negara Migrant Korban Tindak Kekerasan • Program Rehabilitasi Sosial
				4. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan korban bencana dalam dan sosial sesuai standar waktu	4.1. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemiskinan kabupaten Kabupaten / Kota 4.2. Meningkatkan pelayanan dasar KPM melalui bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Penganganan Bencana

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pendukung
					4.3. Produktif rumah dan rumah; 4.3. Promulgasi ketahanan bagi keluarga miskin dan rentan melalui bantuan sosial URP 4.4. Mengoptimalkan pendanaan pelayanan tepat tanggap darurat dan penanganan kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana alam	

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak selama periode Rencana ini adalah program prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029. Rencana program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial beserta indikator capaian kinerja sesuai dengan Perubahan RPJMD dengan program prioritas:

1. **Program Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan sasaran program Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perangkat Daerah, Meningkatkan pelayanan publik perangkat daerah dan indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Perangkat Daerah).
2. **Program Pemberdayaan Sosial**, dengan sasaran program meningkatkan kreatifitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kesejahteraan sosial dan indikator kinerja Persentase tingkat kreatifitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kesejahteraan Sosial.
3. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**, dengan sasaran program Meningkatkan layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dan indikator kinerja Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan.
4. **Program Rehabilitasi Sosial**, dengan sasaran program meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dan indikator kinerja Persentase Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
5. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**, dengan sasaran program meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial dan indikator kinerja Persentase Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PSKS.
6. **Program Penanganan Bencana**, dengan sasaran program meningkatkan perlindungan korban bencana dan indikator kinerja Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Pengungsi/Penyintas Korban Bencana.
7. **Program Pengelanaan Taman Makam Pahlawan**, dengan sasaran program meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan dan indikator kinerja Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lebak tahun 2025 maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung tertera sebagai berikut:

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Rupiah (Rp.)		
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Δ
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Demokratis dan Akuntabel	Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81,3 Poin	81,3 Poin	4.579.473.594	4.574.317.536	(105.555.979)
	Pencapaian, Penguatan, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	294.163.000	292.212.000	(1.975.000)
	Penyusunan Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	32.662.000	32.662.000	0
	Kemudahan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Berbasis Risiko SKPD	12 Laporan	12 Laporan	161.500.000	174.270.000	11.070.000
	Adaptasi Kemampuan Perangkat Daerah	100%	100%	3.492.160.774	3.498.175.536	70.000.774
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang / Bulan	20 Orang / Bulan	3.492.160.774	3.498.175.536	70.000.774
	Adaptasi Sistem Perangkat Daerah	100%	100%	221.540.000	209.421.900	(11.227.000)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Pemertanian Bergitar Listrik	1 Paket	1 Paket	3.454.200	3.454.200	0
	Penyediaan Pralaya dan Perlengkapan Listrik	2 Paket	3 Paket	50.000.000	60.320.000	35.320.000
	Penyediaan Bahan Logistik Sederhana	802 Paket	702 Paket	3.778.000	12.428.000	1.550.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	4 Paket	4 Paket	22.700.700	22.700.700	0
	Penyediaan Bahan Baku dan Pembuatan Peramban undangan	24 Dokumen	24 Dokumen	1.100.000	1.100.000	0
	Penyediaan Bahan Material	4 Paket	4 Paket	42.740.000	27.924.000	(17.425.000)
	Penyediaan Rujukan Kelembagaan dan Kemudahan SKPD	12 Laporan	12 Laporan	90.050.000	54.050.000	(17.900.000)

Sumber	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Page (Rp.)		
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	±
	<i>Penyediaan Jasa Pemrograman Sistem Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	673.589.779	309.621.439	(363.967.340)
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	12 Laporan	12 Laporan	132.519.300	132.610.200	0
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	12 Laporan	12 Laporan	461.978.979	307.011.239	(154.967.340)
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemrograman Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	164.377.638	253.857.638	(87.420.000)
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan</i>	7 Unit	7 Unit	124.403.600	118.893.650	(5.520.000)
	<i>Pemeliharaan Perawatan dan Memelihara Lainnya</i>	18 Unit	18 Unit	11.176.000	11.370.000	0
	<i>Pemeliharaan/ Belanja/ Biaya/ Gasing/ Kertas dan Bergambar Lainnya</i>	2 Unit	2 Unit	28.602.000	28.602.000	0
	Sub Jendral			4.679.873.908	4.574.317.536	(105.555.472)
Meningkatkan kompetensi awal yang didapat	<i>Program Pembelajaran Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	100%	440.128.000	396.935.000	(43.200.000)
	<i>Peningkatan Kemampuan Pemasok Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota</i>	28 Orang	28 Orang	369.117.000	266.565.000	(102.550.000)
	<i>Peningkatan Kemampuan Pemasok Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kecamatan Kabupaten/Kota</i>		10 Keluarga	17.430.000	11.350.000	(6.080.000)
	<i>Peningkatan Kemampuan Pemasok Sumber Kesejahteraan Sosial</i>		20 Lembaga	151.580.000	119.020.000	(32.570.000)

Sumber	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Page (Rp.)		
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	±%
	Kelompok Masyarakat Kemasyarakatan Kabupaten/Kota					
	Program Pemangsaan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	0.000.000	0.000.000	0
	Pembiayaan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Debatensi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipindahkan ke Daerah/Kelurahan Asal	100%	100%	0.000.000	0.000.000	0
	Fasilitas Pembiayaan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Debatensi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipindahkan ke Daerah/Kelurahan Asal	10 Orang	10 Orang	0.000.000	0.000.000	0
	Program Rehabilitasi Sosial	100%	100%	485.123.000	478.204.000	-1,473.000
	Rehabilitasi Sosial Dalam Pemenuhan Disabilitas Terbatas, Gangguan Jiwa, Lanjut Usia Terbatas, serta Gelombang Program di Luar Poin Sosial	100%	100%	141.875.000	139.500.000	-2.375.000
	Pemudahan Pemukiman	275 Orang	275 Orang	60.025.000	60.025.000	0
	Pemudahan Sertifikat	68 Orang	68 Orang	24.280.000	24.280.000	0
	Pemudahan Alat Bantu	22 Orang	24 Orang	8.000.000	40.000.000	32.000.000
	Pembiayaan Bantuan Psik. Sosial, Spririt, dan Sosial	45 Orang	45 Orang	14.280.000	8.920.000	-5.355.000
	Pembiayaan Layanan Kesehatan	13 Orang	13 Orang	16.410.000	12.070.000	-4.340.000
	Pembiayaan Pelayanan Pemukiman Keluarga	10 Orang	10 Orang	9.000.000	4.200.000	-4.800.000

Sumber	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pagu (Rp.)		
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	%
	Kebudayaan, Sosial Prestasi Olah Raga, Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	100%	211.340.000	200.714.000	(11,804.000)
	Pembinaan Layanan Dasar dan Pengabdian Masyarakat	20 Orang	20 Orang	9.900.000	9.900.000	(1.000.000)
	Pembinaan Perencanaan	220 Orang	220 Orang	140.100.000	140.100.000	0
	Pembinaan Sertifikasi	60 Orang	60 Orang	22.000.000	22.000.000	0
	Pembinaan Hubungan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20 Orang	20 Orang	9.000.000	4.100.000	(4.900.000)
	Pembinaan Hubungan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	20 Orang	20 Orang	9.000.000	4.220.000	(4.780.000)
	Pembinaan Layanan Rutin	100 Orang	100 Orang	155.900.000	155.900.000	0
	Program Prestasi Olahraga dan Jambore Sosial	100%	100%	8.502.362.200	8.740.548.700	147.986.500
	Pengabdian Ilmu Fisika MIPA Calon Dosen Kabupaten/Kota	100%	100%	1.501.362.200	1.740.548.700	147.986.500
	Pembinaan Ilmu MIPA Calon Dosen Kabupaten/Kota	10.002 Orang	10.002 Orang	62.400.000	29.665.000	(32.735.000)
	Pengabdian Ilmu Fisika MIPA Calon Dosen Kabupaten/Kota	25.212 Keluarga	25.212 Keluarga	1.100.700	1.100.700	0
	Penelitian, Bimbingan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.229 Keluarga	4.229 Keluarga	5.526.276.500	5.505.500.000	(20.776.500)
	Program Peningkatan Rencana Pelaksanaan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	100%	170.138.000	166.880.000	(3.258.000)
	Pembinaan Bimbingan	450 Orang	600 Orang	140.250.000	158.000.000	17.750.000
	Pembinaan Bimbingan	11 Orang	11 Orang	28.300.000	28.500.000	200.000

Sumber	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja		Rincian (Rp.)		
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	±%
	Program Pengabdian Masyarakat	100%	100%	11.713.000	11.713.000	0
	Penerbitan Jurnal Ilmiah	100%	100%	11.713.000	11.713.000	0
	Penerbitan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	11.713.000	11.713.000	0
	Sub Jumlah			4.678.263.200	5.204.132.700	225,407,500
	Jumlah Total			11.358.438.794	11.778.490.236	419.051.442

Sumber : Bagian Program Kerja Sosial Fak. Lohat 2015

2.1.4. Indikator Kinerja Utama

Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/00/M.PAN/3/2007, setiap unit kerja wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator pilihan yang memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Target pencapaian indikator ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektifitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum dimana sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lebak tertera sebagai berikut.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Sosial Kabupaten Latak

Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama	Formula / Rumus Perhitungan	Satuan	Target Kinerja					
Tujuan	Strategi				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Salah SAKIP PD	Rumusan nilai SAKIP dapat diuraikan dengan beberapa cara. Bergantung pada bentuk penilaian yang digunakan. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain, voting, metode rata-rata	Poin	81,08	82	82,5	83	83,5	84
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	$IKM = \frac{\sum (\text{Nilai Kepuasan Variabel} \times \text{Bobot Variabel})}{\text{Total Bobot}}$	Persen	85	85,5	86	86,5	87	87,5
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%) = Jumlah Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan / Total Jumlah Penduduk x 100%	Persen	8,27	8,02	7,81	7,6	7,39	7,18
		Indeks Kesejahteraan Sosial	$KS = (\text{Bobot indikator 1} \times \text{nilai indikator 1}) + (\text{Bobot indikator 2} \times \text{nilai indikator 2}) + \dots + (\text{Bobot indikator n} \times \text{nilai indikator n})$	Persen	58,82	58,92	59,02	59,12	59,22	59,32

Sumber : Rencana Dinas Sosial Kab. Latak, 2021-2026

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan (Bupati Lebak) dan bawahan/nya (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak) untuk mewujudkan target kinerja tertentu pada sumberdaya yang dimiliki oleh perangkat daerah, yang menampilkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target untuk tahun 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini terdapat pada Rencana tahun transisi sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.6
 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Miris)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Terdapat	Target
1.	Mewujudkan pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pemerataan Pemerataan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dirangin	Poin	70	Terdapat I	17,50
					Terdapat II	15,00
					Terdapat III	32,50
					Terdapat IV	15,00
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai NAKIP PD	Poin	61,5	Terdapat I	-
					Terdapat II	-
					Terdapat III	-
					Terdapat IV	41,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	45	Terdapat I	-
					Terdapat II	-
					Terdapat III	-
					Terdapat IV	45

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lebak, 2023

Dengan ditetapkan RPMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029, maka Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lebak mengacu pada penetapan RPMD Kabupaten Lebak, sehingga dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lebak. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Nasaram Strategic	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Terwujud	Target
1.	Meningkatkan Peningkatan Pemertajahan yang Transparan dan Akuntabel	Nilai NAKIP PD	Persen	51,00	Terwujud I	-
					Terwujud II	-
					Terwujud III	-
					Terwujud IV	81,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Peningkat Daerah	Persen	85	Terwujud I	-
					Terwujud II	-
					Terwujud III	-
					Terwujud IV	85
2.	Meningkatkan Keterbacaan sosial yang inklusif	Tingkat Keterbacaan	Persen	6,20	Terwujud I	-
					Terwujud II	-
					Terwujud III	-
					Terwujud IV	6,20
		Indeks Keterbacaan Sosial	Persen	25,00	Terwujud I	-
					Terwujud II	-
					Terwujud III	-
					Terwujud IV	25,00

Sumber : Program Kerja Perubahan Daerah Sosial dan Politik, 2025

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara urutur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan, serta pencapaian sasaran guna mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Dinas Sosial Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029.

Dasar pengukuran kinerja yang digunakan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Revitalisasi Laporan kinerja. Dalam regulasi ini antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala penilaian perangkat kinerja yang dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	60% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lebak diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan/sub kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan/sub kegiatan dilakukan dengan membundlingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Bencana}} \times 100\%$$

Pencapaian KPI Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2025 berilustrasikan Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah disusun secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

No.	Sistem Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemantauan yang Terpadu dan Akutabel	Nilai 3&KIP PD	Poin	00	07,00	102,44	01,00	0	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Peringkat Daerah	Persen	00	84,19	84,20	00	84,61	89,54

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya Kesejahteraan sosial yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	4	4,44	106,60	4,25	4,00	102,40
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	49,75	49,75	100	58,42	57,96	101,12

Sumber : Data Dugaan Program Utama Kab. Lahat, Bappenas Kab. Lahat, Bappeda Kab. Lahat

Berdasarkan tabel di atas, rincian realisasi per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Sasaran 1 didukung oleh 2 indikator, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai capaian sebesar 0%, hal ini disebabkan pemantauan dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Lahat pada tahun 2026, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan nilai capaian sebesar 84,61% naik sebesar 0,46% dibandingkan tahun 2024. Capaian rata-rata sasaran 1 tahun 2025 sebesar 49,77% dan berkategori **Sangat Rendah**.

2. Sasaran 2. Meningkatnya Kesejahteraan sosial yang inklusif

Sasaran 2 didukung oleh 2 indikator, yaitu Tingkat Kemiskinan dengan nilai capaian sebesar 8,93% dan mengulangi penurunan tingkat kemiskinan dibandingkan tahun 2024, serta Indeks Kesejahteraan Sosial dengan nilai capaian sebesar 57,56% mengulangi kemunduran sebesar 1,94% dibandingkan tahun 2024. Capaian rata-rata sasaran 2 pada tahun 2025 sebesar **102,81%** dan berkategori **Sangat Tinggi**.

Melihat hasil pengukuran kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Lahat pada tahun 2025 dirampungkan bahwa seluruh sasaran berkategori **Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar **76,29%**. Hal ini disebabkan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah untuk tahun 2025 pada sasaran 1 baru direalisasikan pada bulan Maret 2026.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) per Triwulan Dinas Sosial
Kabupaten Lahat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Nilai AKIP PD	Poin	81,26	Triwulan I	-			Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial Kab. Lahat, pada tahun 2024 yang diratifikasi oleh Inspektori Jendral Nilai AKIP pada tahun 2023.
					Triwulan II	-			
					Triwulan III	-			
					Triwulan IV	81,06	99	118	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	81	Triwulan I	-			Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Lahat Tahun 2023 termasuk dalam rangkai Nilai IKM Dinas Sosial Kabupaten Lahat dilaksanakan oleh Bidang Litbang KAPPERINDA Kabupaten Lahat. Untuk Laporan Nilai IKM ditransformasikan setiap akhir tahun.	
				Triwulan II	-				
				Triwulan III	-				
				Triwulan IV	81	84,81	98,54		
2.	Meningkatnya Kesejahteraan sosial yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,23	Triwulan I	-		Laporan indikator kesejahteraan sosial yang bersumber dari BPS Kab. Lahat, dimana tingkat kemiskinan dalam dan Persebaran penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan Tingkat kemiskinan transformasikan setiap satu tahun sekali.	
					Triwulan II	-			
					Triwulan III	-			
					Triwulan IV	8,23	8,03		102,40
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	89,82	Triwulan I	-		Laporan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) bersumber dari		
				Triwulan II	-				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tertulus	Target	Realisasi	%	Keterangan
					Tertulus III Tertulus IV	45.82	37.46	100.13	Kemampuan Sosial dimana hasil pengukurannya ditunjukkan pada awal tahun.

Tabel 3.4
Perbandingan Target IKU Tahun 2024 dan 2025 dengan Target Akhir Renstra
Dinas Sosial Kabupaten Lebak

No.	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			2025			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital									
	Indeks SAKIP					79,3	79,3	100	82,5	97,21
	Indeks Kepuasan Masyarakat					86,25	85,98	100,00	85,21	98,27
2.1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel									
	Indeks SAKIP Pemangku Daerah	80,01	80	87,05	102,44	87,98	0	0	81,5	98,14
<p>Faktor Penghambat : Keterlambatan dalam pemenuhan dengan sarana dan indikator kinerja yang tidak sesuai, pemenuhan kinerja tidak optimal, pencapaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja tidak dilakukan secara berkala.</p>										
<p>Faktor Pendukung : Ketersediaan sarana pemenuhan, persiapan pengukuran kinerja serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan berjangka dan berkala.</p>										
<p>Strategi untuk mewujudkan indikator pada tahun 2026 : Penyempurnaan indikator untuk setiap tahun agar semua kinerja dapat mempengaruhi kinerja yang bersangkutan serta mudah untuk dilakukan pengalihan, monitoring pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, melakukan evaluasi secara tertahap berkala (per semester).</p>										
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemangku Daerah	82,45	80	88,21	92,30	85	84,67	100,00	87	97,23
<p>Faktor Penghambat : Belum adanya tim atau pegawai yang bertugas pelayanan publik.</p>										
<p>Faktor Pendukung : Tingkat kepedulian pengelola pelayanan publik terhadap komplain yang diberikan kepada masyarakat melalui aplikasi surat kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Lebak yang difasilitasi oleh Badan Pengabdian Kabupaten Lebak.</p>										

No	Tajuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			2025			Target Akhir Rencana	Capaian Terhadap Target Akhir Rencana (%)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
<p>Strategi untuk mewujudkan indikator pada tahun 2026 : Menetapkan perijinan serta mengoptimalkan aset melalui aplikasi resmi berbasis masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Lahat serta mengoptimalkan 300 pelayanan publik</p>										
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan									
	Indeks Kesejahteraan	8,68	9	8,68	100,00	8,23	8,11	101,48	8,10	92,03
<p>Faktor Penghambat : Pembukaan data yang disediakan oleh BPS</p>										
<p>Faktor Pendukung : Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari BPS, maka data yang digunakan lebih valid karena memiliki kaidah statistik</p>										
<p>Strategi untuk mewujudkan indikator pada tahun 2026 : Meningkatkan lahan pengalihan rumah produktif/asan masyarakat miskin.</p>										
2.1.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat									
	Indeks Kesejahteraan Sosial	6	51,72	48,72	100	48,82	47,56	101,12	56,22	97,67
<p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dilakukan sebagian orang (kamu saja) menyebabkan tidak ada pemerataan rata-rata setiap orang sehingga terjadi ketimpangan pendapatan yang lebar 2. Tingginya angka pengangguran 3. Kemiskinan yang banyak publik yang tidak sebanding dengan kemiskinan riil ini membuat daya beli masyarakat rendah 4. Kesegangan kualitas pendidikan 5. Sistem kesehatan yang belum merata 6. Ilmu, teknik dan akses teknologi yang tidak memadai menghambat kemajuan ekonomi dan kesehatan lingkungan 7. Mismatch atau ketidamaan masyarakat tertentu yang kurang mendukung kemajuan 8. Tidak adanya kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, gender, atau disabilitas membuat mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berperan 										

No	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			2025			Target Akhir Rencana	Capaian Terhadap Target Akhir Rencana (%)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
	<p>Faktor Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi pendapatan 2. Ketersediaan lapangan kerja yang dapat memberikan lapangan pendapatan bagi keluarga 3. Menyediakan akses sosial dan pelatihan bagi warga untuk meningkatkan ekonomi bagi keluarga miskin dan rentan 4. Akses pendidikan tinggi tingkat tinggi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri/meningkatkan daya saing industri 5. Akses kesehatan yang mencakup seluruh warga 6. Penguatan data mikro yang akurat termasuk program perlindungan sosial mencapai target yang tepat. 									
	<p>Strategi untuk mewujudkan indikator pada tahun 2026</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan nilai bisnis data terpadu yang akurat untuk memantapkan nilai akurat dalam perencanaan anggaran 2. Sistem perlindungan sepanjang hayat 3. Meningkatkan bantuan sosial agar penerimaannya tidak selanjutnya bergantung pada bantuan, sehingga dibekali pelatihan kewirausahaan 									

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) per Triwulan Dinas Sosial
Kabupaten Lahat Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Nilai AKIP PD	Poin	81,28	Triwulan I	-			Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial Kab. Lahat, pada tahun 2024 yang diratifikasi oleh Inspektori Jendral Nilai AKIP pada tahun 2023.
					Triwulan II	-			
					Triwulan III	-			
					Triwulan IV	81,08	99	118	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	81	Triwulan I	-			Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Lahat Tahun 2023 termasuk dalam kategori Nilai IKM Dinas Sosial Kabupaten Lahat dikemukakan oleh Bupati Lahat HAPHERINDA Kabupaten Lahat. Untuk Laporan Nilai IKM ditransformasikan setiap akhir tahun.	
				Triwulan II	-				
				Triwulan III	-				
				Triwulan IV	81	84,81	98,54		
2.	Meningkatnya Kesejahteraan sosial yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,23	Triwulan I	-		Laporan indikator kesejahteraan sosial yang bersumber dari BPS Kab. Lahat, dimana tingkat kemiskinan dalam dan Perantara penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan Tingkat kemiskinan transformasikan setiap satu tahun sekali.	
					Triwulan II	-			
					Triwulan III	-			
					Triwulan IV	8,23	8,03		102,40
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	89,82	Triwulan I	-		Laporan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) bersumber dari		
				Triwulan II	-				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Tertutup	Target	Realisasi	%	Keterangan
					Tertutup III Tertutup IV	45.82	37.46	100.12	Kemampuan Sosial dimana hasil pengukurannya ditunjukkan pada awal tahun.

Tabel 3.4
Perbandingan Target IKU Tahun 2024 dan 2025 dengan Target Akhir Renstra
Dinas Sosial Kabupaten Lebak

No.	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			2025			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital									
	Indeks SAKIP					79,3	79,3	100	82,5	97,21
	Indeks Kepuasan Masyarakat					86,25	85,98	100,00	85,21	98,27
3.1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel									
	Indeks SAKIP Pemangku Daerah	80,01	80	87,05	102,44	87,98	0	0	81,5	98,14
<p>Faktor Penghambat : Keterlambatan dalam pemenuhan dengan sarana dan indikator kinerja yang tidak sesuai, pemenuhan kinerja tidak optimal, pencapaian kinerja tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja tidak dilakukan secara berkala.</p>										
<p>Faktor Pendukung : Ketersediaan sarana pemenuhan, persiapan pengukuran kinerja serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan berjangka dan berkala.</p>										
<p>Strategi untuk mewujudkan indikator pada tahun 2026 : Penyempurnaan indikator untuk setiap tahun agar semua kinerja dapat mempengaruhi kinerja yang bersangkutan serta mudah untuk dilakukan pengalihan, monitoring pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, melakukan evaluasi secara tertahap berkala (per semester).</p>										
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemangku Daerah	82,45	80	88,21	92,30	85	84,67	100,00	87	97,23
<p>Faktor Penghambat : Belum adanya tim atau pegawai yang bertugas pelayanan publik.</p>										
<p>Faktor Pendukung : Tingkat kepedulian pengelola pelayanan publik terhadap komplain yang diberikan kepada masyarakat melalui aplikasi surat kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Lebak yang difasilitasi oleh RuangTanggap Kabupaten Lebak.</p>										

No	Tajuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			2025			Target Akhir Rencana	Capaian Terhadap Target Akhir Rencana (%)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
<p>Strategi untuk mewujudkan indikator pada tahun 2026 : Menetapkan perijinan serta mengoptimalkan aset melalui aplikasi resmi berbasis masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Lahat serta mengoptimalkan 300 pelayanan publik</p>										
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan									
	Indeks Kesejahteraan	8,68	9	8,68	100,00	8,21	8,11	101,48	8,10	92,03
<p>Faktor Penghambat : Pembukaan data yang disediakan oleh BPS</p>										
<p>Faktor Pendukung : Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari BPS, maka data yang digunakan lebih valid karena memiliki kaidah statistik</p>										
<p>Strategi untuk mewujudkan indikator pada tahun 2026 : Meningkatkan lahan pengalihan rumah produktif/asan masyarakat miskin.</p>										
2.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat									
	Indeks Kesejahteraan Sosial	6	51,72	48,72	100	48,82	47,56	101,12	56,22	97,67
<p>Faktor Penghambat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ekonomi yang hanya dilakukan sebagian orang (kamu saja) menyebabkan tidak ada pemerataan rata-rata setiap orang sehingga terjadi ketimpangan pendapatan yang lebar 2. Tingginya angka pengangguran 3. Kemiskinan yang banyak publik yang tidak sebanding dengan kemiskinan riil ini membuat daya beli masyarakat rendah 4. Kesegangan kualitas pendidikan 5. Sistem kesehatan yang belum merata 6. Ilmu, teknik dan akses teknologi yang tidak memadai menghambat kemajuan ekonomi dan kesehatan lingkungan 7. Mismatch atau ketimpangan masyarakat antara yang kurang mendidung kemajuan 8. Tidak adanya kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, gender, atau disabilitas membuat mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja 										

No	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian 2023	2024			2025			Target Akhir Rencana	Capaian Terhadap Target Akhir Rencana (%)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
	<p>Faktor Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi pendapatan 2. Ketersediaan lapangan kerja yang dapat memberikan lapangan pendapatan bagi keluarga 3. Menyediakan akses sosial dan pelatihan bagi warga untuk meningkatkan ekonomi bagi keluarga miskin dan rentan 4. Akses pendidikan tinggi tingkat tinggi dan pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri/meningkatkan daya saing industri 5. Akses kesehatan yang mencakup seluruh warga 6. Penguatan data mikro yang akurat termasuk program perlindungan sosial mencapai target yang tepat. 									
	<p>Strategi untuk mewujudkan indikator pada tahun 2026</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan nilai bisnis data terpadu yang akurat untuk memantapkan nilai akurat dalam perencanaan anggaran 2. Sistem perlindungan sepanjang hayat 3. Meningkatkan bantuan sosial agar penerimaannya tidak selanjutnya bergantung pada bantuan, sehingga dibekali pelatihan kewirausahaan 									

3.1.2. Analisis Capaian Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan perjanjian kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Pada laporan evaluasi ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut:

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2025
2. Nilai realisasi tahun 2025 dengan target akhir Renstra
3. Nilai realisasi tahun 2025 dengan realisasi pada tahun 2024
4. Nilai realisasi tahun 2025 dengan realisasi 5 tahun terakhir
5. Faktor penghambat dan faktor pendukung

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi, maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi rencana aksi sebagai langkah awal perencanaan serta perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya. Berikut analisis capaian kinerja sasaran dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja setiap sasaran.

3.1.2.1. Sasaran 1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral kepada masyarakat. Secara konteks kesejahteraan sosial, sasaran ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi agar seluruh program pembangunan dan benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Untuk mencapai capaian kinerja, sasaran ini didukung oleh 2 (dua) indikator, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian RKP	2024			2025			Target Akhir Rencana	Capaian Terhadap Target Akhir Rencana (%)
			target	Realisasi	%	target	Realisasi	%		
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90,00	90	87,95	102,44	91,89	0	0	83,2	96,11
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,25	90	84,15	92,50	85	84,50	90,54	81	97,25

Sumber: Sub Bagian Program Ditum 600, Laboh

Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 1 pada Rencana Dinas Sosial tahun 2019-2024 dan Rencana Dinas Sosial tahun 2025-2029 tidak ada perubahan, sehingga rata-rata capaian sasaran 1 sebesar 48,77% atau berkategori sangat rendah. Hal ini disebabkan nilai awal untuk indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 baru dimulai pada tahun 2026.

Upaya Dinas Sosial Kabupaten Laboh terhadap capaian sasaran 1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel, didukung oleh program yaitu:

1. Program Peningkat Kualitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.6
Pengukuran Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Kategori Program	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian tahun 2025	2024		2023		Target Akhir Rencana	Capaian Terhadap Target Akhir Rencana (%)
				Tarset	Realisasi	%	Target		
Membina dan meningkatkan kemampuan Daerah Meringkatkan pelayanan publik perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,00	98	97,98	102,44	97,98	98	99,98
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	92,49	98	98,15	93,59	98	94,08	98,54

Sumber : Nilai Budget Program, Dinas Kab. Lelaut, 2025

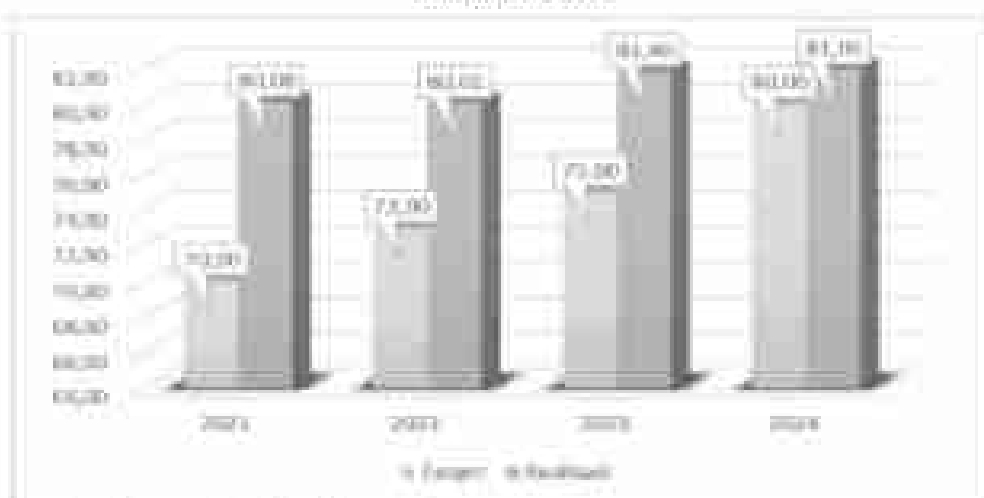
Indikator program ini ditunjukkan dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan administrasi, keuangan, kepegawaian, pelayanan publik dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rata-rata tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 untuk sementara sebesar 49,77% dan berkategori **Sangat Rendah**, hal ini disebabkan indikator Nilai SAKIP Perangkat daerah untuk capaian 2025 dimula pada tahun 2026. Jika dibandingkan dengan capaian akhir target Rencana:

1. Nilai SAKIP Perangkat daerah untuk tahun 2024 mencapai 98,34%
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat daerah untuk tahun 2025 mencapai 97,25%

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat daerah adalah hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, termasuk perangkat daerah. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan. Gambaran capaian nilai SAKIP Dinas Sosial Kabupaten Lebak tersaji sebagai berikut.

Grafik 3.1
Perkembangan Capaian Nilai SAKIP Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2021-2024

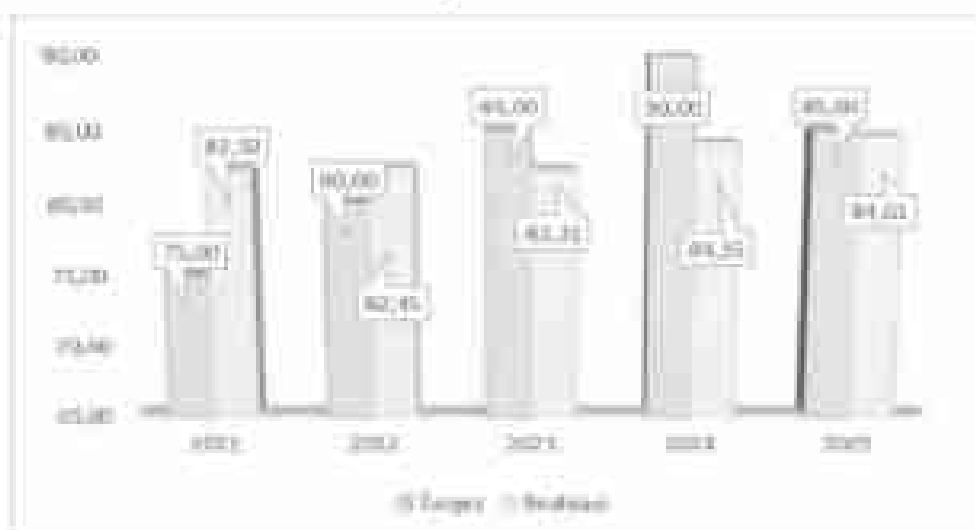


Sumber: Laporan Kerja Lebak, 2021-2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik ini dilakukan melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen yang terstandarisasi guna mengevaluasi kinerja pelayanan publiknya. Lebih dari itu, Indeks Kepuasan Masyarakat bahkan telah digunakan sebagai indikator kinerja utama pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, guna terus mengevaluasi dan meningkatkan performa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unit-unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Gambaran capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Lebak tersaji sebagai berikut.

Grafik 3.2
Perkembangan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Sosial Kabupaten Lahat Tahun 2021-2025



Sumber: Bapemas Kab. Lahat, 2021-2025

Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh beberapa indikator dengan tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% dan memiliki capaian yang sama pada tahun 2024. Apabila dibandingkan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Rencana tercapai 100%. Berikut didukung untuk indikator pendukung program peningkat urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tersaji sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Pendukung Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	2024		2025		
				Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Setiap Perangkat Daerah	Pada	80	81,90	102,44	81,90		
Peningkatan, Peningkatan, dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	3	3	100
Kontribusi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Harat Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	100	12	12	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	31	31	100	20	20	100
Administrasi Casus Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sistem Casus Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Keperluan Intai/Intisipasi/ Pengawasan Kegiatan Kantor	Jumlah Paket Keperluan Intai/Intisipasi/ Pengawasan Kegiatan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	1	1	100
Penyediaan Pralaks dan Berkegiatan Kantor	Jumlah Paket Pralaks dan Berkegiatan Kantor yang Disediakan	Paket				2	2	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	372	372	100	462	462	100
Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	Paket	2	2	100	4	4	100
Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perbaikan bangunan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perbaikan Bangunan yang Disediakan	Dokumen	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	4	100	4	4	100
Penyempurnaan Rapor Kinerja dan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyempurnaan Rapor Kinerja dan Kinerja SKPD	Laporan	12	12	100	12	12	100

Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	2024		2025		
				Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah yang Akurat dan Berkualitas	%	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Komunikatif, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikatif, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kasus	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kasus yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	12	100
Pemeliharaan Ruang MMB Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Ruang MMB Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Ruang Pemeliharaan dan Fasilitas Kemandirian Pemungutan Urusan atau Kemandirian Urusan Lainnya	Jumlah Kemandirian Pemungutan Urusan atau Kemandirian Urusan Lainnya yang Dipelembarkan	Unit	47	47	100	7	7	100
Pemeliharaan Fasilitas dan Media Lainnya	Jumlah Fasilitas dan Media Lainnya yang Dipelembarkan	Unit	14	14	100	17	17	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelembarkan	Unit	3	3	100	3	3	100

Sumber : A/R Kegiatan Program, Daerah Kab. Kediri, 2024-2025

Berdasarkan tabel di atas, bukti pendukung untuk indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 dan tahun 2025 tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun pelaksanaan Rencana telah tercapai 100%.

Program Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja

2. Kegiatan Administrasi Kesatuan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perumahan-sulungan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungut Utusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.1.1.2. Sasaran 2. Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif

Sasaran ini bertujuan peningkatan kualitas hidup tidak hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat atau golongan tertentu saja, tetapi mencakup seluruh keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat adat/berpengal. Untuk mencapai capaian kinerja, sasaran ini didukung oleh 2 (dua) indikator, yaitu Tingkat Kemiskinan dan Indeks Kesejahteraan Sosial.

Tabel 3.8
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2021			2022			Target Akhir Rencana	Capaian Terhadap Target Akhir Rencana (%)
			target	Realisasi	%	target	Realisasi	%		
1	Indeks Kemiskinan	1,44	9	8,84	99,44	8,27	8,65	99,49	7,34	92,48
2	Indeks Kesejahteraan Sosial	0	97,72	98,70	101,00	99,82	97,96	98,12	98,22	97,67

Sumber : Data Laporan Program Ditama Kab. Lebak

Sasaran 2 diukur melalui indikator Tingkat Kemiskinan dan Indeks Kesejahteraan Sosial dengan rata-rata capaian sebesar 102,81% atau berkategori Sangat Tinggi. Jika dibandingkan dengan capaian terhadap target akhir Rencana ditargetkan rata-rata sebesar 94,85%.

Tingkat Kemiskinan

Setiap pembangunan yang dilaksanakan pada akhirnya selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan yang rendah umumnya dikategorikan sebagai penduduk miskin. Angka kemiskinan merupakan angka yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Angka kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan nasional yaitu memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2.100 kilokalori perhari ditambah dengan non makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan pendidikan dan lainnya.

Tabel 3.9
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lebak Tahun 2021-2022

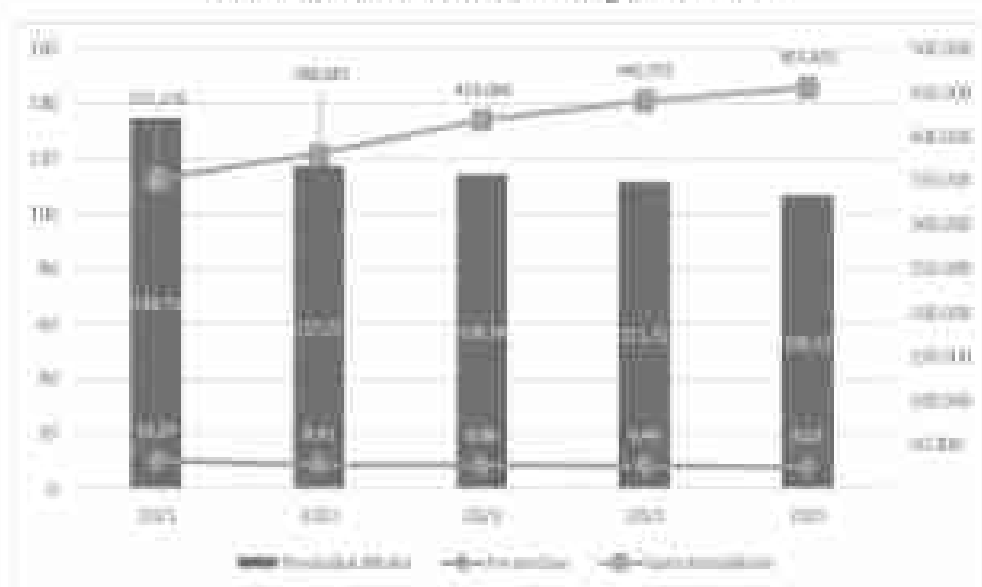
Tahun	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase	Garis Kemiskinan (rupiah/bulan/orang)
2021	134,75	10,29	152.120
2022	117,22	8,91	180.661

Tahun	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase	Angka Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)
2023	114,54	8,60	419.066
2024	111,71	8,44	440.705
2025	106,52	8,03	455.011

Sumber: BPS Kab. Lebuk

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Lebuk pada tahun 2025 mencapai 8,03%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,41%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan mulai mengalami penurunan dan tingkat pendapatan penduduk miskin sudah mulai mengalami peningkatan.

Grafik 3.3
Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan



Sumber: BPS Kab. Lebuk

Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial adalah instrumen pengukur komprehensif yang mengevaluasi kualitas hidup melalui dimensi kebutuhan dasar, pemenuhan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Berfokus pada pembangunan manusia dan inklusi sosial, Indeks Kesejahteraan Sosial memotivasi keberhasilan program sosial, mengatasi ketimpangan, serta mengimplementasikan kebijakan pemerintah menuju masyarakat yang bermartabat dan mandiri.

Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan indikator baru yang dimasukkan dalam Rencana Dinas Sosial tahun 2025-2029. Tingkat capaian Indeks Kesejahteraan Kabupaten Lelaik adalah sebagai berikut:

Tahun	Desa Umum	Desa Liris	Desa Disabilitas
2024	35,32		
2025	37,50	49,00	40,05

Sumber: Kementerian Sosial, 2024-2025

Upaya Dinas Sosial Kabupaten Lelaik terhadap capaian sasaran 2 meningkatnya kesejahteraan sosial yang efektif, didukung oleh program, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Pemangunan Warga Negara Migrant Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Pemangunan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program Pemberdayaan Sosial

Tabel 3.10
Pengukuran Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Sosial

Nama Program	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian tahun 2025	2024			2025			Target Akhir Rencana	Capaian Terhadap Target Akhir Rencana (%)
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS) Kabupaten Lelaik	Program Pemberdayaan Sosial	Program peningkatan indikator: Perolehan Swadaya Kesejahteraan Sosial (PKKS) Kabupaten Lelaik	100	100	100,00	100,00	100	100	100,00	100	100,00

Sumber: Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Lelaik, 2025

Indikator program ini ditujukan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperempuan kejuangan dan kesetia kawan sosial dengan tingkat capaian pada tahun 2025 sebesar 100% dan berkategori Sangat Tinggi. Jika dibandingkan dengan tingkat capaian tahun 2024 memiliki capaian yang sama yaitu 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian akhir target Rencana telah tercapai 20/100%.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2024 dan 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase tingkat keaktifan Peserta Simulasi Kesejahteraan Sosial (PKS) Kesejahteraan Sosial	Person	100	100	100	100	100	100
Pengembangan Peserta Simulasi Kesejahteraan Sosial Peserta Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan PKS	Person	100	100	100	100	100	100
Peningkatan Kemampuan Peserta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota	Uraian Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota yang Menguasai Kapasitas Kemampuan Kecamatan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	100	20	20	100
Peningkatan Kemampuan Peserta Simulasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota	Uraian Tenaga yang Menguasai Kapasitas Kemampuan Kecamatan Kabupaten/Kota	Orang				10	10	100
Peningkatan Kemampuan Peserta Simulasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Kabupaten/Kota	Uraian Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Menguasai Kapasitas Kemampuan Kecamatan Kabupaten/Kota	LuarNegeri	20	20	100	20	20	100

Sumber : Bidang Pemberdayaan Sosial, Ditmas Kab. Gresik, 2024, 2025

Program Pemberdayaan Sosial sebagaimana terlihat pada tabel di atas, didukung oleh kegiatan Pengembangan Peserta Simulasi Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
 Kewenangan Kabupaten/Kota

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi peningkatan kemampuan bagi
 Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dan relawan sosial. Capaian kinerja sub kegiatan
 ini pada tahun 2025 terdapat 100%

Tabel 3.12
 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Relawan Sosial Tahun 2023

No.	Kecamatan	TKSK		Relawan Sosial	
		Jumlah	Tersertifikasi	Jumlah	Tersertifikasi
1.	Bangkabung	1	0	80	0
2.	Luwihajar	1	1	60	0
3.	Cumhuang	1	0	50	0
4.	Wawangmung	1	0	60	0
5.	Cibela	1	0	60	0
6.	Cibada	1	1	74	0
7.	Mencang	1	1	65	0
8.	Cipanas	1	0	70	0
9.	Cibahi	1	0	49	0
10.	Bojongmandi	1	0	45	0
11.	Sajati	1	1	74	0
12.	Bojoneuri	1	1	90	0
13.	Boyah	1	0	55	0
14.	Sebang	1	1	50	0
15.	Cinaga	1	0	51	0
16.	Cijaku	1	1	50	0
17.	Gumuhmuncana	1	0	50	0
18.	Cinayen	1	1	50	0
19.	Malangping	1	0	70	0
20.	Waruatan	1	0	65	0
21.	Kalangaryan	1	0	35	0
22.	Cilogong	1	1	45	0
23.	Mata	1	0	70	0
24.	Cihara	1	0	27	0
25.	Pangratangan	1	0	50	0
26.	Cibatu	1	1	60	0
27.	Lihakgolong	1	1	18	0
28.	Ciguguhang	1	0	40	0
	JUMLAH	28	11	1.524	0

Sumber: Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas KBL, Lohol, 2023

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Lebak berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lebak. TKSK ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 65/SK/DIRK.01/D/2024 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dari 28 TKSK tersebut yang sudah mengikuti sertifikasi sebagai relawan sosial kesejahteraan sosial kecamatan sebanyak 11 (sebelas) orang, sementara untuk relawan sosial diambil dari data Pekerja Sosial Masyarakat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak Nomor: B-388/D.12/Kap.43-Dinasos/VIII/2024, tentang Penetapan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Lebak Periode 2024-2029, untuk PSM belum ada yang mengikuti Sertifikasi Relawan Sosial, adapun lembaga pelaksana sertifikasi adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Vimalbudi Kegiatan sosialisasi peningkatan kemampuan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) dan relawan sosial





2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan PSRS keluarga dan bantuan sosial kepada janda perintis kemerdekaan. Capaian kinerja sub kegiatan ini pada tahun 2025 mencapai 100%

Visualisasi penyerahan bantuan sosial bagi janda perintis kemerdekaan



3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kebutuhan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian alat kontak kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, sosialisasi pembangunan kelembagaan masyarakat, dan pemberian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Capaian kinerja sub kegiatan ini pada tahun 2025 mencapai 100%.

Berikut adalah Peningkatan Kemampuan Pemenuhan Sumber Kesejahteraan Sosial Kebutuhan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 3.13
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Tahun 2025

No.	Kecamatan	LKS	
		Jumlah	Terakreditasi
1	Rangkasbitung	10	2
2	Lewidamar	2	0
3	Cungbunung	1	0
4	Warunggunung	2	0
5	Cibaler	2	0
6	Cibadak	2	0
7	Muncung	3	2
8	Cipanas	6	1
9	Cikuhur	1	0
10	Bojongmanik	4	0
11	Sajira	3	0
12	Banjarwati	1	0
13	Bidayah	2	0
14	Sobung	0	0
15	Camarga	0	0
16	Cipaku	0	0
17	Gumilangmulya	0	0
18	Cicimtu	0	0
19	Melamping	0	0
20	Wanasalam	0	0
21	Kalanganayur	0	0
22	Cibugrang	0	0
23	Maja	1	0
24	Cibatu	0	0
25	Punggarangan	0	0
26	Cibesar	0	0
27	Lebakgedong	0	0
28	Cipembiang	0	0
JUMLAH		40	5

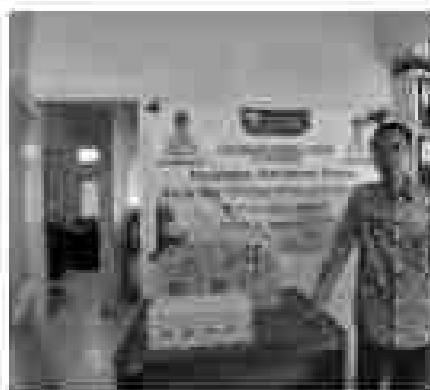
Sumber / Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Kals, Lebak, 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdaftar pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak adalah 40 (empat puluh) lembaga dengan rincian sebagai berikut: 24 (dua puluh empat) lembaga belum mengikuti akreditasi lembaga, 11 (sebelas)

lembaga telah beraktya masa berlaku ajadapannya dan 5 (lima) lembaga masih berlaku sampai dengan tahun 2025, adapun lembaga pelaksana sertifikasi adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Visualisasi

Penyerahan dan Komak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)



Sosialisasi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat



Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)



Permasalahan:

1. Keterbatasan Anggaran
2. Belum terlapat Peraturan dan kebijakan terkait pengembangan kapasitas relawan

Solusi:

1. Menyediakan Pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan Kemampuan dan pengetahuan relawan

2. Membetulkan pengakuan dan dukungan kepada relawan dalam rangka meningkatkan kapasitas relawan

Rekomendasi/rencana tindak lanjut:

1. Menyampaikan Usulan Penumbuhan Anggaran
2. Menyusun modul regulasi terkait Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3. Melaksanakan Sosialisasi program dengan Dinas Sosial Propinsi dan Kementerian RI terkait Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Program Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan

Table 3.14
Pengukuran Indikator Kinerja Program Penanganan Warga Negara Korban Migran Tindak Kekerasan

Nama Program	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Tahun 2023	2024			2025			Target Akhir Rencana	Capaian Terhadap Target Akhir Rencana (%)
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Meningkatkan jumlah penanganan warga negara korban tindak kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Perentase warga penerima pelayanan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	100	100	51,96	51,96	100	60,00	60,00	100	100

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Kutha Lethak, 2023

Indikator program ini adalah persentase Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan. Program ini dilaksanakan dalam upaya pemulihan sosial bagi pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Capaian indikator program pada tahun 2023 sebesar 60,00% dan belum optimal. Rendah, jika dibandingkan dengan tahun 2024 capaian indikator kinerja meningkat. Hal ini disebabkan kurangnya informasi terkait warga negara migran yang mendapatkan tindak kekerasan. Apabila dibandingkan dengan akhir tahun pelaksanaan Rencana tercapai 12,00%.

Ini pekerja migran Indonesia tetap menjadi sorotan dihadapan masyarakat Indonesia. Berbagai situasi ketenagakerjaan, demografi, sosial, ekonomi dan tuntutan globalisasi menyebabkan tinggaya tingkat migrasi tenaga kerja antar daerah maupun dari Indonesia ke luar negeri.

Pendidangan orang merupakan sebuah keahlian terapan yang dengan sangat baik, yang mana terjadi menggunakan metode konvensional maupun modern. Dalam hal ini, pendidikan manusia dapat terjadi baik secara sangat sederhana di ruang lingkup nasional sampai dengan di ruang lingkup internasional.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Tahun 2024 dan 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Person	100	87,26	87,26	100	60,00	60,00
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarbarasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarbarasi di Daerah Kabupaten/ Kota ke Desa/ Kelurahan asal untuk Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarbarasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Person	100	95,00	95,00	100	60,00	60,00
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarbarasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarbarasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Person	9	5	55,56	0	0	0,00

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Kait Labak, 2024-2025

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebagaimana terlihat pada tabel di atas, didukung oleh kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarbarasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan sub kegiatan:

1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarbarasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah memfasilitasi pemulangan warga migran korban tindak kekerasan ke daerah asal baik pekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada tahun 2025 terdapat 6 pekerja migran yang dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Capaian kinerja untuk kualitas sebesar 80,00% dari target 10 warga migran yang akan difasilitasi.

Tabel A.16
Fasilitasi Warga Negara Migran yang Mengalami Tindak Kekerasan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Nama	Diburgas	Keterangan
1.	Cipaku	TKI Mulyana Dagal	Jakarta	Dikembalikan kepada keluarga dan mendapatkan bantuan kewirausahaan dan Kementerian Sosial
				
2.	Cipaku	TKI Mulyana Dagal	Jakarta	Dikembalikan kepada keluarga dan mendapatkan bantuan kewirausahaan dan Kementerian Sosial
				
3.	Cipaku	TKI Mulyana Dagal	Jakarta	Dikembalikan kepada keluarga

No.	Keramatan	Kasus	Debuergasi	Keterangan
4.	Cijiki	TKI Malaysia Begal	Bakara	dan mendapatkan bantuan kewanjanaan dan Kemiskinan Sosial
5.	Cihara	TKI Malaysia Begal	Bakara	Dikembalikan kepada keluarga dan mendapatkan bantuan kewanjanaan dan Kemiskinan Sosial
6.	Cihara	Pekerta Migran Kasari Buar	Katai	Dikembalikan kepada keluarga

No.	Kecamatan	Kasus	Debagasi	Keterangan
				

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas KKM Lombok, 2017

Permasalahan:

1. Kurangnya koordinasi dengan OPD dan Lembaga terkait warga negara migran korban tindak kekerasan
2. Pemilangan warga negara migran korban tindak kekerasan belum dilakukan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial bagi dikawatirkan terkendala anggaran.

Solusi:

1. Melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan OPD dan Lembaga terkait warga negara migran korban tindak kekerasan.
2. Pengusunan anggaran kepada Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial bagi warga negara migran korban tindak kekerasan.

Rekomendasi/rencana tindak lanjut:

1. Perlu dilakukan pertemuan rutin dengan OPD dan Lembaga terkait warga negara migran korban tindak kekerasan, serta menjalin kerjasama.
2. Penetapan target fasilitasi penanganannya warga negara migran korban tindak kekerasan dalam rencana kerja Dinas Sosial.

Program Rehabilitasi Sosial

Tabel 3.17
Pengukuran Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Sosial

Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Tahun 2025	2024			2025			Target Akhir Rencana	Capaian Terhadap Target Akhir Rencana (%)
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Memperkuat pelayanan dan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerta Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	91,87	100	81,46	81,46	100	99,36	99,36	100	100,0

Sumber : JWang Rehabilitasi Sosial, Dinas KID, Lelang, 2025

Indikator program ini diujikan dalam upaya pemulihan rehabilitasi sosial dasar dalam bentuk pemulihan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami defisiensi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Tingkat capaian pada tahun 2025 sebesar 99,36% dan berkategori Tinggi, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 81,46%. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun pelaksanaan Rencana mencapai 100,00%.

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2024 dan 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerta Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persen	100	81,46	81,46	100	99,36	99,36
Rehabilitasi Sosial Dasar Peningkatan Kualitas Pelayanan, Aspek Pelayanan, Layanan dan Pelayanan, serta	Persentase pelaksanaan program-program rehabilitasi sosial dan program-program layanan dan layanan, lanjut dan layanan	Persen	100	88,67	88,67	100	99,72	99,72

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2023		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Gelangan Program di Luar Panti Sosial	serta gelangan dan program di luar panti sosial							
Pelayanan Perawatan	terdak orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perawatan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Keselamatan Kabupaten/Kota	Orang	842	812	100	228	228	100
Pelayanan Nangih	terdak orang yang Menerima Pelayanan Kelengkapan Larutan yang Terakreditasi di Tahan Keselamatan Kabupaten/Kota	Orang				68	68	100
Prevensi Stuk Hara	terdak orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Fungsi sesuai kebutuhan Kelengkapan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	100	24	24	100
Pelayanan Bimbingan Gizi, Mental, Spiritual dan Sosial	terdak Peserta Bimbingan Psik, Mental, Spiritual dan Sosial Keselamatan Kabupaten/Kota	Orang				49	49	100
Pelayanan Layanan Kesehatan	terdak orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kelengkapan Kabupaten/Kota	Orang	9	9	9	13	12	92,31
Pelayanan Pelayanan Perawatan Kelengkapan	terdak orang yang Mendapatkan Pelayanan Perawatan Kelengkapan Keselamatan Kabupaten/Kota	Orang				18	18	100
Kelembagaan Sosial	Pelayanan pelaksanaan kelembagaan sosial PPAK dan/atau Badan Usaha RW/UMMA dan NAFKA di luar Panti Sosial	Pemas	100	96,21	96,21	100	100	100
Pelayanan Layanan Duka dan Penguburan	terdak orang yang Mendapatkan Layanan Duka dan Penguburan Keselamatan Kabupaten/Kota	Orang				28	28	100
Pelayanan Perawatan	terdak orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perawatan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Keselamatan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	100	126	126	100
Pelayanan Nangih	terdak orang yang Menerima Pelayanan Kelengkapan Larutan yang Terakreditasi di	Orang	68	68	100	68	68	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Pemberian Bantuan Pokok, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tahun Kesempatan Kedua/Kelima Grafik Poverty Bantuan Pokok, Mental, Spiritual dan Sosial Kesempatan Kedua/Kelima	Orang				20	20	100
Pendataan Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lanjut Usia Tidak Kritis (MVAHS) dan NAFKA	Grafik Poverty dalam Rasterisasi Distribusi Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lanjut Usia Tidak Kritis (MVAHS) dan NAFKA Kesempatan Kedua/Kelima	Orang	20	20	100	20	20	100
Pemberian Layanan Bantuan	Grafik Orang Mendapatkan Layanan Bantuan Kesempatan Kedua/Kelima	Orang	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Ditmas Kiri Latak, 2024-2025

Berdasarkan tabel di atas, Program Rehabilitasi Sosial didukung oleh 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial, dengan sub kegiatan:

1) Penyediaan Permukiman

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian permukiman untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan respon kasus. Tingkat capaian kinerja sub kegiatan ini terrealisasi sebesar 100%. Target pada tahun 2025 beckantung dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan penyediaan permukiman difokuskan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dan Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS) lainnya, sedangkan bantuan permukiman untuk kegiatan lainnya tidak termasuk pada target SPM.

Penyediaan permukiman ditargetkan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas sebanyak 200 orang dan untuk respon kasus berdasarkan laporan masyarakat sebanyak 75 orang.

Bukti dukung pelaksanaan kegiatan penyediaan permukiman sebagai berikut:

Tabel 3.19
**Bantuan Permukiman bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
 Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Lainnya Tahun 2025**

No.	Urutan	Penyandang Disabilitas Terlantar		Anak Terlantar		Lanjut Usia Terlantar		PPKS Lainnya	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	LKS Uyah Hantah Perwira			15	15	10	10		
2.	LKS Dharma Widhi			25	25				
3.	LKS Sakti Jaya			15	15	10	10		
4.	LKS Bina Jaya			20	20	15	15		
5.	LKS Dharma Sakti	50	50						
6.	LKS Mitra Insan			15	15	15	15		
7.	LKS Dharma Widhi			10	10				
	Sub Jumlah			100	100	50	50		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi		
				200	200	100	100		
	Respon Kasus								
	Target sebanyak 75 orang untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan PPKS lainnya				75		75		75
	Sub Jumlah				75		75		75
					Target		Realisasi		Realisasi
	Jumlah				275		275		275

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial, Ditroa Kab. Lahat, 2025

Berdasarkan tabel di atas, penyediaan permukiman teralisasi 100% dari target 275 orang dengan rincian untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) teralisasi 100% dari target 200 orang, dan penyediaan permukiman untuk respon kasus teralisasi 100% dari target 75 orang.

Visualisasi

Penyediaan Permukiman untuk LKS



Penyediaan Pirmakaman untuk Respon Hasan



2) Penyediaan Sandang

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian sandang berupa family kit untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan respon hasan sebanyak 48 orang dan pampers lansia sebanyak 20 orang teralisasi 100%.

Bukti dukung pelaksanaan kegiatan penyediaan sandang sebagai berikut:

Tabel 3.20
Rantian Sandang bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Usia Terlantar dan PPKS Lainnya Tahun 2025

No.	Urutan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Family Kit	48	48	100
	Penyandang Disabilitas Terlantar	15	15	100
	Anak Terlantar	10	10	100
	Lansia Usia Terlantar	15	15	100
	PPKS Lainnya	2	2	100
2.	Pampers Lansia	20	20	100

Sumber: *Rekening Rehabilitasi Sosial, Dinas KEM, Lombok, 2025*

Visualisasi:





3) Penyediaan Alat Bantu

Berikut kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian bantuan Alat Bantu Dengar (ABD) sebanyak 6 unit, Kruk/Tongkat Ketuk sebanyak 5 unit dan kursi roda sebanyak 10 unit dengan total unit 24 unit teralisasi 100%. Penyerahan alat bantu bagi Penerima Manfaat ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lahat Nomor : B-400/9640-Kep/Dinas/SX/2025 tanggal 30 October 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu Dengar, Kruk dan Kursi Roda.

Visualisasi:

Alat Bantu Dengar (ABD)



Keril/Tunggal Ketuk



Kursi Roda



4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian motivasi dan penguatan keluarga kepala 45 orang dengan rincian penyandang disabilitas terlahar sebanyak 15 orang, anak terlahar sebanyak dan lanjut usia terlahar sebanyak 15 orang. Kegiatan ini terlaksana 100%.

Visualisasi:



5) Pemberian Layanan Kedaruratan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemilasan jumlah Orang Terlantar sebanyak 3 orang terrealisasi 2 orang, dan layanan kedaruratan respon kasus sosial laporan masyarakat sebanyak 10 orang terrealisasi 10 orang. Tingkat capaian sub kegiatan pemberian layanan kedaruratan sebesar 92,31%.

Visualisasi:

Pemilasan jumlah Orang Terlantar



Respon Kasus



6) Pemberian Pelayanan Pendaftaran Keluarga

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah proses pencarian dan identifikasi keluarga yang terpisah dari keluarga dan membutuhkan perlindungan sosial, dengan tujuan utama menyatukan kembali (reunifikasi), menetapkan haknya/pakawana dan menjamin perlindungan sosial berkelanjutan.

Capaian kinerja pelayanan pendaftaran keluarga realisasi 10 orang atau 100%.

Bukti dukung pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan pendaftaran keluarga sebagai berikut:

Tabel 3.21
Data Layanan Pendaftaran Keluarga dan Reunifikasi
Tahun 2025

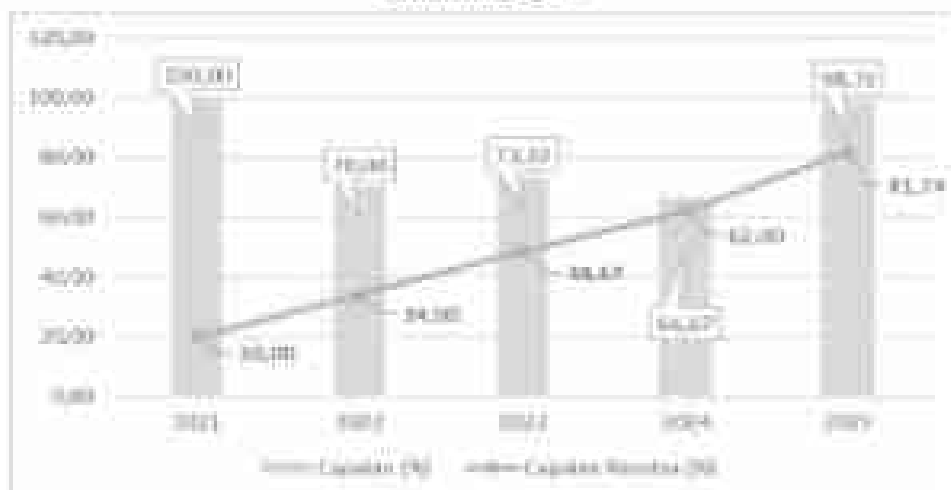
No.	Nama	Alamat	Kronologi Kasus	Tanggal Mulai Pendaftaran	Tanggal Reunifikasi	Keterangan Tidak lanjut
1.	Aarna Alhalla Az Zahra	Kp. Sipantik RT 001 TW 001 Desa Sekaraja Kec. Wananggung	Klien merupakan AMH anak berkebutuhan yang dapat perawatan di Rumah Apresiasi Selama 1 tahun tidak terjadi dan Dinyai Kata Perintah.	24-01-2025	17-02-2025	Klien telah diidentifikasi kepada keluarga
2.	Diah Siti Muthana	Kp. Lembang RT 001 RW 001 Kel. Ranggaasihong Dist. Kec. Ranggaasihong	Klien merupakan sahabat oleh Dinas Sosial Kota Bogor	25-04-2025	25-04-2025	Klien telah diidentifikasi kepada keluarga
3.	Maitan Istikom	Kp. Bayah II RT 001 RW 002 Desa Bayah Bant. Kec. Bayah	Klien merupakan sahabat keluarga yang diidentifikasi oleh masyarakat di kecamatan Cibinong. Kabupaten Lebak dan ditunjuk ke Rumah Sungai Desa Sosial Kabupaten Lebak.	07-05-2025	09-05-2025	Klien telah diidentifikasi kepada keluarga oleh Dinas Sosial Kab. Lebak.
4.	Irena Christia Ary	Kerendang Timur Gg 1 RT 001 RW 002 Kel. Tambah Kec. Tambora Selatan Kota	Klien merupakan sahabat di kota ke Rumah Sungai Desa Sosial Kabupaten Lebak.	15-06-2025	15-06-2025	Klien diantar oleh keluarga di Rumah Sungai Desa Sosial Kab. Lebak.
4.	Tubagus Harun Durr	Kp. Kaly Durr RT 005 RW 002 Desa Cempayang Kec. Cisarua Kab. Serang	Klien merupakan sahabat oleh Polsek Wananggung	22-07-2025	22-07-2025	Klien telah diidentifikasi kepada keluarga oleh Dinas Sosial Kab. Lebak.
6.	Salsabi	Kp. Karna Lebak RT 006 RW 006 Kel.	Klien merupakan sahabat keluarga yang diidentifikasi oleh	24-08-2025	24-08-2025	Bantuan ke UPI Perumahan

No.	Nama	Alamat	Kronologi Kasus	Tanggal Mulai Penanganan	Tanggal Remediasi	Keterangan Tidak lanjut
7.	Rizki Nur	RT. Barat Km. Bapuhabatang Kp. Pasar Buah RT124 RW 001 Desa Banjaran Km. Waranggung	terjadi kasus oleh Dinas Sosial Kota Tangerang Klien ditemukan selama di Panti Sosial Bina Insan Bangun Desa 2 Provinsi Jakarta	12-09-2023	18-09-2023	Sosial Dasar Profilus Bantu Klien telah direrhabilitasi kepada keluarga oleh Dinas Sosial Kota Lelah Dinas Sosial melakukan penemuan kembali, penempatan langsung dilakukan oleh keluarga Klien direrhabilitasi kepada keluarga saat di Kecamatan: Cisarua Kabupaten Lelah
8.	Denny Mahyana	Kp. Araya RT 002 RW 012 Desa Kepan Km. Cisarua Kab. Bogor	Klien merupakan pengungsi kepingan dan ditemukan selama di wilayah Cisarua Kecamatan Kabupaten Lelah	09-11-2023	15-11-2023	direrhabilitasi kepada keluarga saat di Kecamatan: Cisarua Kabupaten Lelah
9.	Sandra Irfi Rahalia	Kp. Bojong Lembang RT 002 RW 005 Desa Bojongaya Km. Karawang Kota Tangerang	Klien ditemukan selama di wilayah Karawang; Kabupaten Lelah dalam kondisi gangguan mental setelah keluar dari rumah	25-11-2023	26-11-2023	Klien direrhabilitasi kepada keluarga saat di Kecamatan: Cisarua Kabupaten Lelah
10.	Agus Sapriyana	Kp. Asah Sial RT 001 RW 004 Desa Nauru Bandung Kab. Cisarua Kab. Bandung Barat	Klien ditemukan selama di RSUD Arjadinata Lelah dengan kondisi mengalami gangguan kejiwaan	07-12-2023	10-12-2023	Keluarga ditemukan

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Kab. Lelah, 2023

Berdasarkan uraian dari 8 sbb kegiatan, maka tingkat capaian kinerja kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan indikator Penetapan pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial tercapai 98,72% dan berkategori **Sangat Tinggi**, meningkat dibandingkan tahun 2024.

Grafik 3.4
Perkembangan Capaian Persentase Pelaksanaan Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun 2021-2025



Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Keri, Lombok, 2021-2025

2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan:

- 1) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah proses penyediaan, pengolahan, dan verifikasi data (seperti data sosial atau perizinan) untuk memastikan akurasi informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan publik untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. Sub kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2025 dan terakumulasi 100%.

Tabel 3.22
Pemberian Layanan Data dan Pengukuran
Untuk SPM Bidang Sosial Tahun 2025

No.	Nama	NIK	Tempat Tanggal Lahir	Alamat
Penyandang Disabilitas Terdaftar				
1.	Jusuf	9902204401911000	Latak, 04-08- 1981	Kp. Cikant (RUM) RT.0001 Desa Pasirbangan Kec. Cibungay
2.	Asyraf	9902205201021000	Latak, 25-04- 1982	Kp. Tipe RT.0001 RW.001 Desa Latak Tipe Kec. Cibungay
3.	Asang	9902203001000002	Latak, 07-09- 1976	Kp. Latakpangray Desa Pasirbangan Kec. Cibungay
4.	Apriadi	9902202101000002	Latak, 21-07- 1980	Kp. Cikant RT.0001 RW.001 Desa Cibungay Kec. Cibungay
5.	A. (Pemerintahan) S. A.	9902141900000000	Ranghachang 13-07-2007	Kp. Sany RT.0001 RW.001 Desa Melayu Cibungay Tipe Kec. Ranghachang
6.	Aidi Mulyati	9902140001001002	Latak, 08-08- 1980	Kp. Cemp. Tegal RT.0001 RW.001 Desa Cikant Kec. Ranghachang
7.	Ahmad Saifudin	9902142701000000	Latak, 27-09- 1980	Kp. Cioke RT.0001 RW.002 Desa Jantahya Kec. Ranghachang
8.	Ayup Muzal	9902141000021000	Latak, 11-05- 2002	Kp. Dikah RT.0001 RW.001 Desa Cioke Kec. Ranghachang
9.	Bahri	9902141901000000	Latak, 13-08- 1979	Kp. Pura Latak RT.0001 RW.001 RW.001 Desa Cibungay Tipe
10.	Devil	99021400010021000	Latak, 08-07- 1982	Kp. Tangay RT.0001 RW.001 Desa Numpang Melayu
11.	Diah Sri Martani	9902144001010000	Latak, 08-08- 1977	Kp. Lanting RT.0001 RW.001 RW.001 Ranghachang Desa Kec. Ranghachang
12.	Febrianti	9902070704170002	Latak, 12-04- 1972	Kp. Gungay RT.0001 RW.001 Desa Melayu Kec. Ranghachang
13.	Rani	9902204701010000	Latak, 05-10- 1978	Kp. Bahay Desa RT.0001 RW.001 Desa Latakpang Kec. Cibungay
14.	Rani	9902200701000000	Latak, 05-11- 1990	Kp. Gung RT.0001 RW. 001 Desa Gungay Kec. Cibungay
15.	Dina Tini H.	9902064001020002	Latak, 08-08- 1972	Kp. Daga RT.0001 RW.001 Desa Warhan Kec. Lampuluh
16.	Agustina	9902172707041000	Latak, 27-07- 1974	Kp. Sumpang Desa Cibungay Melayu Kec. Cibungay
17.	Rani	9902170100000000	Latak, 01-08- 1980	Kp. Sumpang Desa Cibungay Melayu Kec. Cibungay
18.	Utang Mulyati	9902141901000000	Raga, 07-08- 1980	Kp. Ayas Desa RT.0001 RW.001 Desa Kupa Kec. Cibungay

No.	Nama	NIK	Tempat Tanggal Lahir	Alamat
19.	Azzah Syarifina	921707140340000	Bontolung, 19 07-2004	Kp. Sepek, Desa RT 011 RW 014 Desa Sepek Bontolung, Kec. Cigugur
20.	Azzah	900209426071000	Luhok, 01-08 2019	Kp. Cikarangpek RT 015 RW 000 Desa Cikarang Kec. Maripati
Anak Terlantar				
1	Azzahidha	990211000112000	Perung, 28-04 2012	Kp. Karangrejo RT 002 RW 01 Desa Cempaka Kec. Waringguning
2	Diana Nugro	990211000711000	Luhok, 01-07 2011	Kp. Jendang RT 011 RW 014 Desa Cempaka Kec. Waringguning
3	Deyniel	990211000412000	Luhok, 01-08 2012	Kp. Jendang Rt 011 RW 004 Desa Cempaka Kec. Waringguning
4	Friana Rahmatul	99021100112000	Luhok, 16-07 2012	Kp. Karangrejo RT 006 RW 005 Desa Waringguning Kec. Waringguning
5	Haniha	990211000111000	Luhok, 04-08 2011	Kp. Cempang RT 000 RW 01 Desa Cempaka Kec. Waringguning
6	Izzah Derranah	021210110112000	Indarajaya, 21 01-2012	Kp. Cempang RT 010 RW 014 Desa Cempaka Kec. Waringguning
7	Isis Azzahab	990211000111000	Luhok, 11-08 2011	Kp. Karangrejo RT 000 RW 001 Desa Cempaka Kec. Waringguning
8	Azzah Nur Hafiza	9902110011012000	Luhok 01-08 2012	Kp. Cempang RT 006 RW 001 Desa Waringguning Kec. Waringguning
9	Isis	990211000112000	Luhok, 16-08 2011	Kp. Karangrejo RT 006 RW 001 Desa Waringguning Kec. Waringguning
10	Kharisma	990211000112000	Luhok, 05-01 2012	Kp. Desa Tandang RT 016 RW 001 Desa Waringguning Kec. Waringguning
11	Azzah Adhwa Az Zahra	917101001001000	Perung, 25- 07-2016	Kp. Karangrejo Desa Indarajaya Kec. Waringguning
12	Viviana Pusriah	990209426071000	Luhok, 01-07 2019	Kp. Cikarang RT 002 RW 012 Desa Cikarang Kec. Luhok
13	Mahmud Saifulah Maulid	990111200111000	Luhok, 22-08 2019	Kp. Cikarang RT 001 RW 011 Desa Cikarang Kec. Luhok
14	Azzah Qudus Maulida	990209426071000	Luhok, 01-01 2019	Kp. Cikarang RT 001 RW 001 Desa Cikarang Kec. Luhok
15	Isyiah Azzahra	990209426071000	Luhok, 26-08 2019	Kp. Cikarang RT 001 RW 012 Desa Cikarang Kec. Luhok
16	Nurhikmah	990209426071000	Luhok, 17-08 2019	Kp. Desa Desa RT 011 RW 013 Desa Cikarang Kec. Luhok

No.	Nama	NIK	Tempat Tanggal Lahir	Alamat
17	Rani Hasmah	9902147904200000	Lahir, 19-06- 2009	RTN Pajeneh Karang RT 042 RW 009 Desa Karangpanggung Malia Kec. Karangpanggung
18	Pegat Rahayu	9902085206100000	Lahir, 12-08- 2010	Kp. Karang Pasir RT 004 RW 001 Desa Tamanan Kec. Banjaran
19	Dina Dwiya Sari	9902147911000000	Lahir, 15-11- 2008	Kp. Melayung Tengah RT 002 RW 001 Kel. Cijasa Paur Kec. Karangpanggung
20	Muhammad Anwar	9902140811150000	Lahir, 09-11- 2020	Kp. Melayung Tengah RT 002 RW 001 Kel. Cijasa Paur Kec. Karangpanggung
21	Ahmadia Nabil Yuliana	9902081410250000	Lahir, 13-10- 2020	Kp. Karang Pasir RT 004 RW 001 Desa Tamanan Kec. Banjaran
22	Harti Rahmawati	9902170900000000	Lahir, 18-09- 2015	Kp. Mardel Agrovay RT 011 RW 004 Desa Cibatu Kec. Cibatu
23	H. Nuraini	9902090000121000	Lahir, 09-08- 2002	Kp. Cikarang RT 011 RW 001 Desa Cikarang Kec. Banjaran
24	Mahmut Fiqih	9902090007110000	Lahir, 08-07- 2013	Kp. Lelahekan RT 002 RW 001 Desa Lelahekan Kec. Banjaran
25	Nora Anwar	9902144111125000	Lahir, 01-11- 2012	Kp. Koder RT 001 RW 001 Desa Koder Malia Kec. Karangpanggung
Lanjut Usia Terbatas:				
1	Arwah	9902147904210000	Lahir, 17-08- 1994	Kp. Paur Pasir RT 004 RW 001 Desa Paksihela Kec. Majalengka
2	Arwah	9902110013420000	Lahir, 26-11- 1942	Kp. Mardel RT 011 RW 001 Desa Paksihela Kec. Majalengka
3	Arwah	9902119701540000	Lahir, 17-01- 1949	Kp. Kaja Desa RT 001 RW 001 Desa Paksihela Kec. Majalengka
4	Arwah	9902147904210000	Lahir, 07-08- 1992	Kp. Cikarang RT 001 RW 001 Desa Paksihela Kec. Majalengka
5	Arwah	9902116012480000	Lahir, 21-01- 1942	Kp. Jeter RT 001 RW 002 Desa Paksihela Kec. Majalengka
6	Arwah	9902147904210000	Lahir, 01-08- 1994	Kp. Paksihela RT 001 RW 001 Desa Paksihela Kec. Majalengka
7	Arwah	9902084021960000	Lahir, 02-02- 1999	Kp. Paksihela RT 001 RW 001 Desa Paksihela Kec. Lelahekan
8	Bekas	9902171112000000	Lahir, 27-04- 1962	Kp. Cikarang RT 001 RW 001 De. Kikarang Kec. Cikarang
9	Arwah	9902084021960000	Lahir, 08-01- 1997	Kp. Paksihela Desa Wanurea Kec. Lelahekan
10	H. Anwar	9902120801100000	Lahir, 29-08- 1951	Kp. Cikarang RT 001 RW 001 Desa Wajung's Kec. Cikarang
11	Arwah	9902110013450000	Lahir, 16-01- 1947	Kp. Koder RT 001 RW 001 Desa Koder Tegal Kec. Wajung's
12	Arwah	9902140010210010	Lahir, 01-07- 1962	Kp. Karang RT 001 RW 001 Desa Karang Kec. Wajung's

No.	Nama	NIK	Tempat Tinggal Lahir	Alamat
13.	Rat	990211000110001	Lelah, 20-08- 1991	Kp. Singsing RT 001 RW 001 Desa Banjarasinil Kp. Wanasuganda
14.	Eddy Sugandi	9902110001120001	Lelah, 18-08- 1992	Kp. Cikak RT 001 RW 002 Desa Mangrove Kp. Umang
15.	Dito	9902107112540001	Lelah, 16-12- 1993	Kp. Pakem RT 001 RW 004 Desa Wanasari Kp. Lembang
16.	Yuhari	9902142112390001	Lelah, 27-02- 1994	Kp. Bumi Lelah RT 006 RW 006 Kp. Nyala Caring Bumi Kp. Rangkasbitung
17.	Jayena	9902179112560001	Lelah, 11- 11-1994	Kp. Singsing Desa Caring Singsing Kp. Cikak
18.	Bismillah	9902029011130001	Lelah, 19-07- 1995	Kp. Pakak RT 002 RW 011 Desa Singsing Kp. Pangsariharjo
19.	Aad	9902020411140001	Lelah, 04-11- 1995	Kp. Pakak RT 001 RW 001 Desa Singsing Kp. Pangsariharjo
20.	Karanda	9902080201140002	Lelah, 16-08- 1996	Kp. Singsing RT 001 RW 002 Desa Tambaran Kp. Rangkas

Sumber: *Buku Rekrutimen Sosial, Dinas KBL Lelah, 2025*

2) Penyediaan Permakanan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian permakanan bagi ODCI di Yayasan Dime Syifa dan pemberian permakanan untuk PPKS lainnya di Rumah Singgah Rangkasbitung dan Rumah Singgah Jakarta. Tingkat capaian sdb kegiatan ini tercapai sebesar 100%.

Tabel 3.23
Bantuan Permakanan untuk PPKS Lainnya Tahun 2025

No.	Urutan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Yayasan Dime Syifa	20	20	100
2.	Rumah Singgah Rangkasbitung	150	150	100
3.	Rumah Singgah Jakarta	150	150	100
Jumlah		320	320	100

Sumber: *Buku Rekrutimen Sosial, Dinas KBL Lelah, 2025*

3) Penyediaan Sandang

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian pakaian kepada Orang Terlantar yang dirujuk ke Rumah Singgah Rangkasbitung, Rumah Singgah Jakarta dan Yayasan Bumi Syifa.

Tabel 3.24
Penyediaan Sandang Tahun 2025

No.	Unit	Bentuk Sandang	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rumah Singgah Rangkasbitung	Pakaian	20	20	100
2.	Rumah Singgah Jakarta	Pakaian	20	20	100
3.	Yayasan Bumi Syifa	Pakaian	20	20	100
	Jumlah		60	60	100

Sumber: Buking Rehabilitasi Sosial, Dinas Kab. Lebak, 2025

4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penguatan dan pemulihan mental bagi anak korban ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) sehingga mampu melakukan aktivitas sosialnya. Kegiatan ini ditargetnya sebanyak 20 orang dan terrealisasi 100%.

5) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

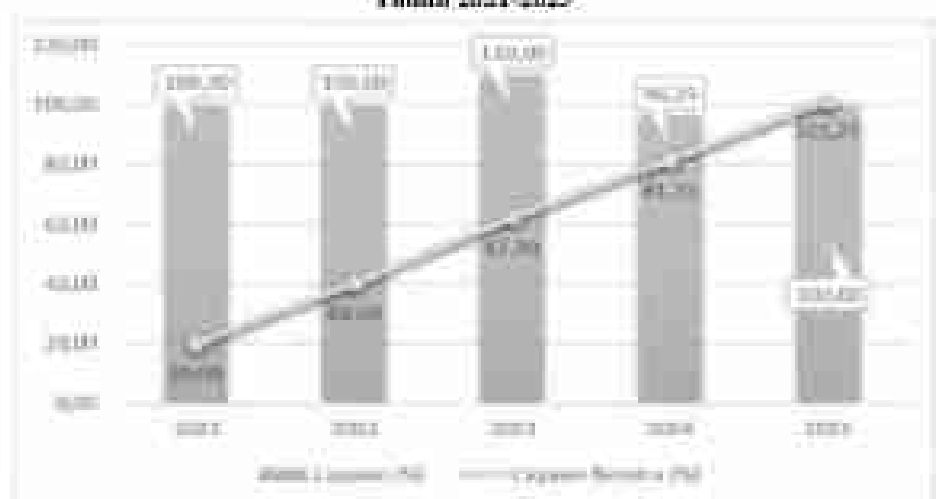
Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penguatan dan pemulihan mental bagi keluarga anak korban ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) sehingga mampu melakukan aktivitas sosialnya. Kegiatan ini ditargetnya sebanyak 20 orang dan terrealisasi 100%.

6) Pemberian Layanan Rujukan

Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa serah terima rujukan di Jakarta sebagai tempat layanan rujukan dengan target 120 orang penerima layanan rujukan, dan pelaksanaan layanan rujukan psikologi klinis di RSUD dr. Adjuharso bagi anak korban ABH dengan target 10 orang, terrealisasi 100%.

Berdasarkan uraian dari 6 sub kegiatan di atas, tingkat capaian kinerja kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial mencapai 100,00% atau bertingkat Sangat Tinggi, meningkat dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar 96,25%.

Grafik 3.5
Perkembangan Capaian Indikator Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial Tahun 2021-2025



Sumber: *Wilayah Rehabilitasi Sosial, Dinas Kish Takah, 2021-2025*

Untuk diketahui bahwa pada dasarnya program rehabilitasi sosial bertujuan untuk:

1. Memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu yang mengalami disfungsi sosial agar dapat berfungsi kembali secara wajar di masyarakat;
2. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan individu;
3. Mencegah terjadinya masalah sosial yang lebih luas;
4. Memenuhi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Permasalahan:

1. Identifikasi dan jangkauan

- Selanya mengidentifikasi dan menjangkau semua individu yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial, termasuk mereka yang hidup di daerah terpencil atau kelompok marginal
 - Keterbatasan data dan informasi mengenai populasi yang membutuhkan rehabilitasi, seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan narkoba, atau individu yang mengalami masalah kesehatan mental dan PPKS lainnya
 - Jumlah pekerja sosial, relawan sosial atau tenaga pendamping sosial yang terdistribusikan tidak sebanding dengan jumlah PPKS yang membutuhkan bantuan.
2. Keterbatasan dan aksesibilitas layanan
- Kurangnya fasilitas dan layanan rehabilitasi sosial yang memadai dengan sumber daya terbatas
 - Akses yang sulit ke layanan rehabilitasi karena faktor geografis, ekonomi atau diskriminasi
3. Kualitas layanan
- Kualitas layanan rehabilitasi yang bervariasi dan tidak standar, tergantung pada ketersediaan sumber daya dan tenaga profesional yang kompeten
 - Kurangnya tenaga profesional yang terlatih dan berpengalaman di bidang rehabilitasi sosial
4. Keterbatasan anggaran untuk program rehabilitasi sosial yang dapat mempengaruhi kualitas dan jangkauan layanan
5. Koordinasi dan integrasi
- Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat, dalam menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif
 - Kurangnya integrasi antara layanan rehabilitasi sosial dengan layanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan
6. Stigma dan diskriminasi
- Stigma dan diskriminasi terhadap individu yang membutuhkan rehabilitasi sosial yang dapat menghambat proses pemulihan dan reintegrasi sosial mereka
 - Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi sosial dan dampak positif bagi individu dan masyarakat

7. Monitoring dan evaluasi

- Kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengukur keberhasilan program rehabilitasi sosial dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki
- Kurangnya data dan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan program rehabilitasi sosial

Subsidi

1. Peningkatan identifikasi dan jangkauan

- Melakukan pendataan dan pemetaan populasi yang membutuhkan rehabilitasi sosial
- Mengembangkan strategi untuk menjangkau individu yang tinggal di daerah terpencil atau kelompok marginal

2. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas layanan

- Memaksimalkan rumah sungguh sebagai salah satu fasilitas dan layanan rehabilitasi sosial
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan layanan rehabilitasi jarak jauh

3. Peningkatan kualitas layanan

- Mengembangkan standar kualitas layanan rehabilitasi sosial dan memastikan implementasinya
- Menyediakan pelatihan dan pengetahuan profesional bagi tenaga ahli rehabilitasi sosial

4. Peningkatan pendanaan

- Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program rehabilitasi sosial
- Mencari sumber pendanaan alternatif

5. Peningkatan koordinasi dan integrasi

- Membangun mekanisme koordinasi yang efektif antara berbagai pihak
- Mengintegrasikan layanan rehabilitasi sosial dengan layanan lain yang dibutuhkan oleh PPKS

6. Penguatan stigma dan diskriminasi

- Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi sosial dan dampak positif

- Melibatkan tokoh masyarakat dalam mengkomunikasikan isu-isu terkait rehabilitasi sosial
7. Peningkatan monitoring dan evaluasi
 - Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk mengukur keberhasilan program
 - Menggunakan data dan informasi yang akurat untuk memperbaiki program dan kebijakan rehabilitasi sosial

Rekomendasi/rencana tindak lanjut:

1. Membuat pemetaan populasi yang membutuhkan rehabilitasi sosial untuk setiap kecamatan di Kabupaten Lahat
2. Melakukan identifikasi dan asesmen terhadap kebutuhan PPKS
3. Menyusun rencana rehabilitasi sosial yang sesuai dengan kebutuhan PPKS
4. Melibatkan PPKS dan keluarga PPKS dalam proses rehabilitasi sosial
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi sosial
6. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program rehabilitasi sosial
7. Meningkatkan kualitas tenaga pelaksana program rehabilitasi sosial melalui pendidikan dan pelatihan
8. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial
9. Evaluasi program rehabilitasi sosial perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tabel 3.25
Pengukuran Indikator Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sistem Program	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Tahun 2023	2024			2025			Target Akhir Rencana	Capaian Terhadap Target Akhir Rencana (%)
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Terpeptiditas Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKn	100	100	99,66	99,66	100	99,66	99,66	100	100%

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Kedisabilitas, 2025

Indikator program ini ditujukan dalam upaya untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada individu dan keluarga yang menghadapi risiko sosial dan ekonomi. Tingkat capaian pada tahun 2023 sebesar 99,66% berkategori Sangat Tinggi, jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan 0,34%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun pelaksanaan Rencana sudah mencapai 10,93%.

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2024 dan 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Terpeptiditas Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKn	Persen	100	99,66	99,66	100	99,66	99,66
Pengelolaan Data Perekam Medis Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Akurasi data rekam yang diperbaharui	Persen	100	99,98	99,98	100	99,66	99,66
Produksi Foto Medis Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Foto Medis Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Duapuluh	10.000	9.982	100	10.000	10.000	100
Pengelolaan Data Perekam Medis Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekam yang Mempelajari Programasi E-ikm Monev Kabupaten/Kota	Kemungkinan	25.212	25.212	100	25.212	0	0
Insentif Bantuan Sosial Kemungkinan Kemungkinan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Menerima Bantuan	Kelompok	8.279	8.279	99,66	8.279	8.176	99,96

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Target Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kabupaten/Kota							

Sumber : Bidang Lapangan, Dinas Kalsi Lahat, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial didukung oleh 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa penutakhiran data fakir miskin; penutakhiran data Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penutakhiran data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Lahat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Bukti dukung sub kegiatan ini sesuai sebagai berikut.

Tabel A.27
Rekapitulasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DISEN)
Kabupaten Lebak Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Desak 1		Desak 2		Desak 3		Desak 4		Desak 5		Desak 6-10	
				Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu
1.	Malingping	26.552	80.008	2.580	7.983	2.083	6.077	2.224	7.108	2.289	6.980	2.178	6.815	13.428	42.383
2.	Punggurmpa	15.536	45.444	1.236	3.408	1.226	3.523	1.403	4.206	1.516	4.495	1.641	4.778	7.261	21.221
3.	Reyah	17.042	50.148	788	1.844	610	1.780	616	2.528	663	1.010	1.269	1.772	11.288	33.470
4.	Cipanas	18.174	55.293	1.252	3.784	1.205	4.018	1.423	4.653	1.635	5.010	1.642	5.008	8.727	26.323
5.	Mancang	13.117	41.865	1.545	4.941	1.525	4.818	1.494	4.988	1.860	5.853	1.958	5.827	5.881	18.088
6.	Luwitama	21.154	62.071	1.629	4.883	2.456	7.657	2.393	6.671	1.966	6.231	1.918	5.937	7.672	23.667
7.	Bojonegara	5.202	16.074	1.345	3.889	1.413	4.351	1.669	5.328	1.614	5.028	615	2.688	2.634	7.256
8.	Candayekencana	13.957	43.077	1.573	4.960	1.437	4.882	1.578	4.817	1.484	4.853	1.437	4.313	5.830	17.870
9.	Bojopada	23.889	72.902	1.146	3.660	3.088	10.248	2.667	8.406	2.528	8.128	2.444	7.653	8.715	27.082
10.	Gidles	28.188	81.542	1.884	5.188	1.708	5.127	1.889	5.386	1.840	5.877	1.825	5.678	10.038	30.724
11.	Cinaga	25.508	80.341	1.981	5.782	2.673	8.258	2.273	8.189	2.681	8.333	2.484	8.127	10.862	34.500
12.	Sana	26.134	82.024	1.013	3.964	1.882	8.241	1.828	6.123	1.930	6.824	1.995	6.473	8.438	30.003
13.	Mapa	21.762	69.002	1.542	4.088	1.419	4.823	1.418	4.712	1.270	3.252	1.884	6.218	12.898	41.393
14.	Rangsohbang	48.973	149.433	1.863	7.504	1.814	3.212	2.366	7.133	2.634	9.188	3.440	11.125	35.794	106.318
15.	Wangguning	22.313	70.605	1.619	4.918	1.278	4.677	1.589	5.239	1.619	5.382	1.784	6.103	12.945	42.077
16.	Cyahu	12.477	38.451	1.083	2.879	1.054	1.257	1.068	3.125	1.123	1.664	1.119	1.484	6.414	18.653
17.	Cikaba	26.648	80.424	2.236	2.212	1.741	3.238	1.629	1.430	2.081	6.483	1.884	6.127	10.138	33.613
18.	Cihadak	29.111	78.473	1.413	4.413	1.305	4.585	1.543	5.282	1.829	6.254	2.302	7.558	15.192	48.952
19.	Cihayu	22.888	68.242	1.651	5.232	1.388	3.548	1.228	4.784	1.848	3.481	2.131	6.681	12.886	37.423
20.	Cihangay	13.410	38.998	984	2.188	823	1.428	1.693	2.947	1.681	3.243	1.238	3.723	7.568	23.281
21.	Wanuhun	21.748	65.561	2.480	7.471	2.435	7.015	2.214	4.912	2.108	6.634	2.268	6.958	8.820	27.563
22.	Sibang	11.885	36.498	1.272	3.836	1.318	3.039	1.388	3.546	1.216	3.668	1.227	3.585	5.528	18.388
23.	Canghujung	12.867	40.878	1.527	4.883	1.314	4.520	1.328	4.488	1.493	4.817	1.325	4.281	5.434	17.241
24.	Kidangpawa	11.344	43.082	838	2.681	313	1.503	863	3.083	882	3.138	1.071	3.668	2.871	20.442
25.	Canghujung	1.987	22.191	486	1.288	397	1.237	453	1.345	577	1.785	684	2.148	4.192	14.288

No.	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Individu	Desa 1		Desa 2		Desa 3		Desa 4		Desa 5		Desa 6-10	
				Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu
26.	Ghaza	11.025	37.236	1.312	3.673	1.071	3.240	1.226	3.621	231	699	1.400	4.167	5.923	17.614
27.	Cimoro	13.106	32.447	1.216	3.247	1.258	3.418	1.118	3.062	1.283	3.851	1.307	3.887	4.806	13.114
28.	Cigandilong	3.026	11.033	817	2.320	1.043	2.973	865	2.473	937	2.607	508	2.501	2.918	8.378
	Jumlah	311.965	1.188.871	46.685	136.895	41.448	124.448	43.302	136.247	49.271	144.498	47.329	146.239	209.242	613.307

Sumber : Bidang Lingkungan, Dinas Keltan Latak, 2023

2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini pada tahun 2025 tidak dilaksanakan dikarenakan keterlambatan pelaksanaan pengadaannya, sehingga capaian kinerja tercapai 0,00%.

3) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang kepada penyandang disabilitas. Sub kegiatan ini ditargetkan sebanyak 4.239 keluarga dan terrealisasi sebanyak 4.196 keluarga atau 98,99%. Hal ini disebabkan 16 orang meninggal dunia, 2 orang double NIK, 1 orang pindah alamat dan 2 orang tidak diketahui.

Selain bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, bantuan sosial lainnya adalah Bantuan Taklud Terduga bagi korban bencana.

Bukti dukung sub kegiatan ini sesuai pada tabel berikut.

Tabel 3.28
Rekapitulasi Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang
Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2025

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah	Realisasi Tahap I		Realisasi Tahap II	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Batujaya	Citraganti	9	9	100,00	9	100,00
		Bendungan	5	5	100,00	5	100,00
		Cibakarkeud	14	14	100,00	14	100,00
		Kelubak	17	17	100,00	17	100,00
		Cinur	14	14	100,00	14	100,00
		Cidayu	18	18	100,00	17	94,44
		Karak	16	16	100,00	16	100,00
		Cinampok	21	21	100,00	21	100,00
		Luhajaya	15	15	100,00	15	100,00
		Tanaman	8	8	100,00	8	100,00
		Luwatipuh	4	4	100,00	4	100,00
		Bonggomah	14	14	100,00	14	100,00
		Umbulan	3	3	100,00	3	100,00
		Karohayu	5	5	100,00	5	100,00
		Kerta	27	27	100,00	27	100,00
		Kertaditiro	20	20	100,00	20	100,00
		Elmpai	0	0	0,00	0	0,00
		Luhakereuh	17	17	100,00	17	100,00
		Jalagigarang	13	13	100,00	13	100,00
		Cihanggulis	12	12	100,00	12	100,00
		Sub Total	263	262	99,62	261	99,24
2.	Bayah	Susukan	11	11	100,00	11	100,00
		Panabalan	14	14	100,00	14	100,00
		Darmanan	5	5	100,00	5	100,00

No	Kecamatan	Desa	Jumlah	Realisasi Tahap I		Realisasi Tahap II			
				Jumlah	%	Jumlah	%		
		Paitanremp	1	1	41,67	1	61,11		
		Semesta Timur	4	4	50,00	4	100,00		
		Sincah	14	14	50,00	14	61,11		
		Basah Timur	1	1	50,00	1	100,00		
		Cibawa	21	22	50,00	22	100,00		
		Sub Total	41	40	48,19	80	96,39		
3.	Bojongmati	Bojongmati	14	14	50,00	14	100,00		
		Harjawan	9	9	50,00	9	100,00		
		Kaduhawa	13	13	50,00	13	100,00		
		Cibayang	18	17	47,22	17	94,44		
		Keboncau	12	12	50,00	12	100,00		
		Mekarmati	18	18	50,00	18	100,00		
		Mekar Babari	11	12	50,00	12	100,00		
		Pardimata	5	5	50,00	5	100,00		
				Sub Total	99	99	49,19	98	98,99
		4.	Cibadak	Pasar Kering	5	5	50,00	5	100,00
Pitampagan	7			7	50,00	7	85,71		
Kaduhawu Barat	8			8	50,00	8	100,00		
Cibadak	2			1	50,00	1	100,00		
Ayam	3			3	50,00	3	100,00		
Cianga	7			7	50,00	7	100,00		
Restogon	5			5	50,00	5	100,00		
Kaduhawu Tengah	5			5	50,00	5	100,00		
Ayam Maripaku	8			8	50,00	8	100,00		
Bojongliris	12			12	50,00	12	100,00		
Tambakbera	12			12	50,00	12	100,00		
Kaduhawu Timur	13			15	50,00	15	100,00		
Mekar Ayam	10			10	50,00	10	100,00		
				Sub Total	102	102	99,00	101	99,82
5.	Cibatu	Cibatu	15	15	50,00	15	100,00		
		Cibeuk Tengah	23	22	50,00	22	100,00		
		Cibeupat	14	14	50,00	14	100,00		
		Kurungaya	13	15	50,00	15	100,00		
		Kurungari	8	8	50,00	8	100,00		
		Neglasari	5	5	50,00	5	100,00		
		Mekarari	16	16	50,00	16	100,00		
		Cibeuk	17	17	50,00	17	100,00		
		Nikandaya	11	11	50,00	11	100,00		
		Cibeuk Timur	11	11	50,00	11	100,00		
		Waringhaur	9	9	50,00	9	100,00		
		Harjamati	9	9	50,00	9	100,00		
		Siyandaya	19	19	50,00	19	100,00		
		Cibeuk Kidul	4	4	50,00	4	100,00		
		Cibeuk	9	9	50,00	9	100,00		
		Imangah	11	10	45,45	10	90,91		
		Cibeukah	3	4	40,00	3	100,00		
		Cibeuk Barat	2	2	50,00	2	100,00		
		Gumuruhaur	7	7	50,00	7	100,00		
		Waringin	16	16	50,00	16	100,00		
		Cibeuk Sabrang	17	17	50,00	17	100,00		
		Cibatu	13	12	46,15	12	92,31		
				Sub Total	247	244	49,19	245	99,19

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah	Realisasi Tahap I		Realisasi Tahap II	
				Jumlah	%	Jumlah	%
6.	Cipambarang	Cibogor	12	12	100,00	12	100,00
		Cikare	0	0	0,00	0	100,00
		Wanarahayu	10	10	100,00	10	100,00
		Cikarasan	12	12	100,00	12	100,00
		Pisanganjati	8	8	100,00	8	100,00
		Majaya	12	12	100,00	12	100,00
		Cipambarang	21	21	100,00	21	100,00
		Cikarang-Ilir	6	6	100,00	6	100,00
		Cikare	8	8	100,00	8	100,00
		Sub Total	101	101	100,00	101	100,00
7.	Cibaca	Cibaca	9	9	100,00	9	100,00
		Bantur	7	7	100,00	7	100,00
		Lubuk Perumban	16	16	100,00	16	100,00
		Cipasaan	7	7	100,00	7	100,00
		Mekarsari	7	7	100,00	7	100,00
		Palyonggan	8	8	100,00	8	100,00
		Panokkapang	8	8	100,00	8	100,00
		Karanghatalan	20	20	100,00	20	100,00
		Cipatan	27	27	100,00	27	100,00
		Sub Total	108	108	100,00	108	100,00
8.	Cijaha	Cijaha	21	21	100,00	21	100,00
		Kadangan	16	16	100,00	16	100,00
		Bukararang	6	6	100,00	6	100,00
		Mekaraya	4	4	100,00	4	100,00
		Cinanga	13	13	100,00	13	100,00
		Ciputih	5	5	100,00	5	100,00
		Kapindahan	7	7	100,00	7	100,00
		Cihutan	14	14	100,00	14	100,00
Cihurmin	8	8	100,00	8	100,00		
		Sub Total	97	97	100,00	97	100,00
9.	Cidahu	Majayana	9	9	100,00	9	100,00
		Mekarsari	16	16	100,00	16	100,00
		Panokkapang	16	16	100,00	16	100,00
		Gumuruh	23	23	100,00	23	100,00
		Kapangan	11	11	100,00	11	100,00
		Daratan	25	25	100,00	25	100,00
		Cipalang	10	10	100,00	10	100,00
		Cihaur	21	21	100,00	21	100,00
		Panokkapang	17	17	100,00	17	100,00
		Bantur	19	19	100,00	19	94,74
Cidahu	7	7	43,75	7	67,50		
		Sub Total	178	177	98,72	178	98,88
10.	Cidagang	Cidagang	17	17	100,00	17	100,00
		Cidagang	22	22	100,00	22	100,00
		Panuhutan	23	23	100,00	23	100,00
		Cidagang	18	18	100,00	18	100,00
		Gedangbata	7	7	100,00	7	100,00
		Gemilati	13	13	100,00	13	100,00
		Lubukaya	21	21	100,00	21	100,00
		Cihaur	18	18	100,00	18	100,00
		Cikarasan	9	9	100,00	9	100,00
		Cikarasan-Ilir	7	7	100,00	7	100,00
		Sub Total	162	162	100,00	162	100,00

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah	Realisasi Tahap I		Realisasi Tahap II	
				Jumlah	%	Jumlah	%
11	Gimoga	Sedamahi	13	13	100,00	13	100,00
		Gimohili	11	11	100,00	11	100,00
		Jengkatamahi	17	17	100,00	17	100,00
		Karogora	14	14	100,00	14	100,00
		Contingatan	12	12	100,00	12	100,00
		Mogogora	21	21	100,00	21	100,00
		Melakambela	12	12	100,00	12	100,00
		Moguhon	20	20	100,00	20	100,00
		Mogopora	8	8	100,00	8	100,00
		Jayamahi	11	11	100,00	11	100,00
		Seloga	13	13	100,00	13	100,00
		Saragori	8	8	100,00	8	100,00
		Sayonggora	11	11	100,00	11	100,00
		Tambak	14	14	100,00	14	100,00
		Sub Total	188	100,00	188	100,00	
12	Cipasa	Bintayori	5	5	100,00	5	100,00
		Hamsajoty	17	17	100,00	17	100,00
		Bintayongori	19	19	100,00	19	100,00
		Bintayon	21	21	100,00	21	100,00
		Tulakot	20	20	100,00	20	100,00
		Jiyogori	14	14	100,00	14	100,00
		Cipasa	12	12	100,00	12	100,00
		Gediga	14	14	100,00	14	100,00
		Pasuhata	7	7	100,00	7	100,00
		Milanggora	12	12	100,00	12	100,00
		Ngoyong	11	11	100,00	11	100,00
		Talagahing	14	14	100,00	14	100,00
		Gediga	12	12	100,00	12	100,00
		Luhogora	16	16	100,00	16	100,00
		Sub Total	194	100,00	194	100,00	
13	Cintia	Kadadatan	12	12	100,00	12	100,00
		Cintia	19	19	100,00	19	100,00
		Cinjaka	12	12	100,00	12	100,00
		Cihari	7	7	100,00	7	100,00
		Karori	6	6	100,00	6	100,00
		Karogonggori	4	4	100,00	4	100,00
		Danar	18	18	100,00	18	100,00
		Bader	9	9	100,00	9	100,00
		Samparata	13	13	100,00	13	100,00
		Pindatan	23	23	100,00	23	100,00
				Sub Total	122	100,00	122
14	Ganghing	Candi	16	16	100,00	16	100,00
		Cipari	27	27	100,00	27	100,00
		Ciladar	18	17	94,44	17	94,44
		Cilabara	16	16	100,00	16	100,00
		Ciputih	24	24	100,00	24	100,00
		Ganghing	27	27	100,00	27	100,00
		Ganglog	27	27	100,00	27	100,00
		Lebak Auli	25	25	100,00	25	100,00
		Merek	19	19	100,00	19	100,00
		Sekarwang	32	32	100,00	32	100,00
				Sub Total	230	100,00	230

No	Kecamatan	Desa	Jumlah	Realisasi Tahap I		Realisasi Tahap II	
				Jumlah	%	Jumlah	%
15	Kalongene	Cikotop	7	7	100,00	7	100,00
		Kalongene	18	18	100,00	18	100,00
		Ayoh	10	8	80,00	8	80,00
		Sungai Tutung	21	21	100,00	21	100,00
		Pasikata	23	23	100,00	23	100,00
		Sukarakanan	28	27	96,43	27	96,43
		Cilangap	18	18	100,00	18	100,00
	Sub Total	127	120	94,49	120	94,49	
16	Lebakagung	Banmermas	23	23	100,00	23	100,00
		Chilamti	16	16	100,00	16	100,00
		Lebakati	5	5	100,00	5	100,00
		Banaman	19	19	100,00	19	100,00
		Lebakagung	4	4	100,00	4	100,00
		Lebakagung	17	17	100,00	17	100,00
	Sub Total	78	78	100,00	78	100,00	
17	Lewadama	Lebakagung	29	29	100,00	29	100,00
		Lewadama	27	27	100,00	27	100,00
		Megawang	8	8	100,00	8	100,00
		Sangharangg	22	22	100,00	22	100,00
		Jalayang Mulus	13	13	100,00	13	100,00
		Banmermas	16	16	100,00	16	100,00
		Ciaman	11	11	100,00	11	100,00
		Wanman	17	17	100,00	16	94,12
Cilangap	20	20	100,00	20	100,00		
	Sub total	164	164	100,00	163	99,39	
18	Majy	Cilangap	11	10	90,91	10	90,91
		Pasikata	18	14	77,78	14	77,78
		Hitung	10	10	100,00	10	100,00
		McLauri	10	10	100,00	10	100,00
		Sungitig	8	8	100,00	8	100,00
		Pasikata	5	5	100,00	5	100,00
		Biru Mekar	16	16	100,00	16	100,00
		Mara Mara	9	9	100,00	9	100,00
		Majy	7	7	100,00	7	100,00
		Tarungwan	15	15	100,00	15	100,00
		Sulangganya	16	16	100,00	16	100,00
		Caryadak	19	19	100,00	19	100,00
		Gubug Cihemant	13	13	100,00	13	100,00
		Pasikata	7	7	100,00	7	100,00
	Sub Total	162	159	98,15	159	98,15	
19	Maligang	Cilangapan	10	10	100,00	10	100,00
		Cipandori	17	17	100,00	17	100,00
		Kaduna	14	14	100,00	14	100,00
		Kerante	10	10	100,00	10	100,00
		Maligang Selatan	10	10	100,00	10	100,00
		Maligang Utara	11	11	100,00	11	100,00
		Rabung	16	16	100,00	16	100,00
		Sungitig	14	14	100,00	14	100,00
		Amanghah	8	8	100,00	8	100,00
		Sukamajih	16	16	100,00	16	100,00
		Sikaraja	30	30	100,00	30	100,00
		Sundawana	20	20	100,00	20	100,00
Bulang	24	24	100,00	24	100,00		

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah	Realisasi Tahap I		Realisasi Tahap II	
				Jumlah	%	Jumlah	%
		Sub Total:	200	200	100,00	200	100,00
20.	Miyung	Cibitung	8	8	100,00	8	100,00
		Mekarwangi	6	6	100,00	6	100,00
		Sukamajara	9	9	100,00	9	100,00
		Uganku	3	3	100,00	3	100,00
		Sukarajawangi	3	3	100,00	3	100,00
		Mihirana	11	11	100,00	11	100,00
		Panureti	6	6	100,00	5	83,33
		Purnasangka	6	6	100,00	6	100,00
		Cinorosok	3	3	100,00	3	100,00
		Tanjungwangi	15	15	100,00	15	100,00
		Leuwicir	3	3	100,00	3	100,00
		Ciripanjara	14	14	100,00	14	100,00
		Sub Total:	91	91	100,00	90,90	
21.	Pangajenean	Sindangraja	9	9	100,00	9	100,00
		Begawanah	9	9	100,00	9	100,00
		Mekarjati	11	11	100,00	11	100,00
		Sukamati	8	8	100,00	8	100,00
		Pangajenean	13	13	47,33	13	66,67
		Songra	14	14	100,00	14	100,00
		Cinanda	6	6	100,00	6	100,00
		Gunungreah	6	6	100,00	6	100,00
		Sinajen	14	14	100,00	14	100,00
		Cibantengok	3	3	100,00	3	100,00
		Utah	21	21	100,00	21	100,00
				Sub Total:	119	119	49,17
22.	Rangkahitang	Pabunan	24	24	100,00	24	100,00
		Sukamand	14	14	100,00	14	100,00
		Kuteler Watar	17	17	100,00	17	100,00
		Cibata	19	19	100,00	19	100,00
		Mekaraya	8	8	100,00	8	100,00
		Cinyekhitang	3	3	100,00	3	100,00
		Rangkahitang Timur	9	0	0,00	0	0,00
		Narantana Mula	8	8	100,00	8	100,00
		Himatisa	2	2	57,33	2	66,67
		Cinur Pasa	4	4	100,00	4	100,00
		Rangkahitang Barat	9	8	44,44	8	88,89
		Muara Cinyang Timur	19	19	100,00	19	94,74
		Cipara Lebak	25	25	100,00	25	100,00
		Pasar Tanjung	6	6	100,00	6	100,00
		Muara Cinyang Barat	21	20	47,45	20	81,91
		Serang	14	14	100,00	14	100,00
				Sub Total:	226	222	49,12
23.	Najra	Sutra	17	17	100,00	17	100,00
		Sudajaya	8	8	100,00	8	100,00
		Bangarmekar	0	0	0,00	0	0,00
		Pirigasati	11	11	100,00	11	100,00
		Sukamarga	13	13	100,00	13	100,00
		Cigand	9	9	100,00	7	77,78
		Mekaraya	20	20	100,00	20	100,00
		Sutra Mula	12	12	100,00	12	100,00
		Sindangraja	15	15	100,00	15	100,00
Catonghutan	13	13	100,00	13	100,00		

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah	Realisasi Tahap I		Realisasi Tahap II	
				Jumlah	%	Jumlah	%
		Sukarane	15	15	100,00	15	100,00
		Megahatih	22	22	100,00	22	100,00
		Pisapan	9	9	100,00	9	100,00
		Pala	13	12	48,33	12	92,31
		Mareya	0	0	0,00	0	00,00
		Sub Total	198	194	49,74	192	98,46
24.	Seling	Ciporan	17	17	100,00	17	100,00
		Majuan	12	12	100,00	12	100,00
		Haring	13	13	100,00	13	100,00
		Citampang	13	13	100,00	13	100,00
		Sindarata	13	13	100,00	13	100,00
		Sukarya	19	19	100,00	19	100,00
		Amayasa	17	17	100,00	17	100,00
		Sukacem	8	8	100,00	8	100,00
		Seling	20	20	100,00	20	100,00
		Sukarya	11	11	100,00	11	100,00
		Sub Total	148	148	100,00	148	100,00
		25.	Wanarahim	Sidatan	10	10	100,00
Karanga	25			25	100,00	25	100,00
Clangkap	11			11	100,00	11	100,00
Cikandi	16			16	100,00	16	100,00
Karangpandang	13			13	100,00	13	100,00
Sub Total	75			75	100,00	75	100,00
26.	Wananggantung	Wananggantung	18	19	100,00	18	94,74
		Selara	20	20	100,00	20	100,00
		Cempaka	18	17	47,22	18	100,00
		Palawati	24	24	100,00	24	100,00
		Jagabaya	19	19	100,00	19	100,00
		Sukamalah	21	22	100,00	22	100,00
		Bungaran	13	13	100,00	13	100,00
		Selanggatan	5	5	100,00	5	100,00
		Cibuh	11	17	100,00	17	100,00
		Bera	9	9	100,00	9	100,00
		Sukarya	20	20	100,00	20	100,00
		Panrangkil	19	19	100,00	19	100,00
Sub Total	205	214	49,76	214	99,51		
27.	Cikur	Cikur	15	15	100,00	15	100,00
		Ciripampang	11	11	100,00	11	100,00
		Anggalan	2	2	100,00	2	100,00
		Tanaraya	4	4	100,00	4	100,00
		Murung Kepung	10	10	100,00	10	100,00
		Sukarya	11	11	100,00	11	100,00
		Sambutanang	25	25	100,00	25	100,00
		Pantamang	5	5	100,00	5	100,00
		Cigungur Selatan	13	13	100,00	13	100,00
		Sukarya	0	0	0,00	0	00,00
		Mandala	8	8	100,00	8	100,00
		Cigungur Utara	17	17	100,00	17	100,00
		Pada	2	2	100,00	2	100,00
Sub Total	136	136	100,00	136	100,00		
28.	Gambangkonana	Gambangkonana	13	13	100,00	11	84,62
		Karandaya	8	8	100,00	8	100,00
		Sikampora	0	0	0,00	0	00,00

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah	Bantuan Tahap I		Bantuan Tahap II	
				Jumlah	%	Jumlah	%
		Cibahu	11	11	20,00	11	100,00
		Bongkrahong	11	11	20,00	11	100,00
		Bulan	10	10	20,00	10	100,00
		Ciamulang	10	10	20,00	10	100,00
		Cigugur	11	11	20,00	10	90,91
		Cisarung	12	12	20,00	12	100,00
		Tanjungsari (Jajab)	11	11	20,00	11	100,00
		Cimangkilang	6	6	20,00	6	100,00
		Cinurugray	11	11	20,00	11	100,00
		Sub Total	130	130	20,00	127	97,69
		Total	4.239	4.239	49,41	4.136	97,59

Sumber : Bidang Pelayanan, Dinas KMD Kabupaten, 2022

Visualisasi Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas:



Tabel 3.29
 Fasilitas Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agus	Sept	Oktr	Nov	Des	Jud
1.	Banjari	4	2	2			1	2	2	2		1	1	16
2.	Bayah	1								1				2
3.	Bongkrahong		2	3				1				1		7
4.	Cibahu	1	1		4		1	1		4	1		2	17
5.	Cibatu			1		1		6		11				9
6.	Cimangkilang										1			1
7.	Cinurug													0
8.	Cigugur	1							4				1	6
9.	Cikaha				1			1	1	1		1	1	14
10.	Cikifer						2	2	1	2	1	1	1	9
11.	Cigugur		11					1	1		1	2		24
12.	Cisarung				1	2	4	4				2		7
13.	Cipanas		1						1			4		6
14.	Cinanten			1						1		4		6
15.	Cimangkilang			1					1				2	5

No.	Kecamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	Agus	Sept	Okta	Sept	Des	Juli
16.	Gliris/Kemuning				3	2	1		1	2			3	2
17.	Kalipatene		1		1	2				2			1	1
18.	Luhurgedong		1		1			1					1	1
19.	Luwilama	1				1		1	1	2	1	2	4	11
20.	Maja	1	2	1				1				1	1	9
21.	Malingping	3	4	1						1				9
22.	Mlansari							1			1			2
23.	Pangajenean		1	1				2				1		5
24.	Panjanglangu	2	1	1	3			2	1	10	10	6	2	41
25.	Pajala		1								1		2	4
26.	Pelung	1						1		2	1			7
27.	Watasulan		1	1				2	1	1		2		11
28.	Wanayasa	1				1		1		1		2		6
	Jumlah	18	36	13	13	7	7	36	24	33	10	31	50	216

132

Sumber : Bidang Perencanaan, Dinas KMD Cirebon, 2025

Visualisasi Bantuan Sosial Belanja Tidak Terdaftar (BTT) bagi Korban Bencana:



Berdasarkan uraian dari 4 foto kegiatan di atas, tingkat capaian kinerja kegiatan Pengelompokan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase data fakir miskin yang diidentifikasi, tercapai 99,96% atau berkategori Sangat Tinggi, menurun 0,24% dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata capaian sebesar 99,90%.

Permasalahannya:

1. Data penerima manfaat sering kali tidak akurat sehingga menyebabkan bantuan tidak sampai.
2. Keterbatasan anggaran yang dapat menghambat pelaksanaan program perlindungan sosial secara efektif, terutama dalam memberikan bantuan yang memadai kepada semua yang membutuhkan.
3. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah terkait dapat menyebabkan tumpang tindih program atau bahkan tidak ada program yang menyentuh kelompok sasaran tertentu.
4. Pemahaman yang rendah mengenai program perlindungan sosial menyebabkan masyarakat tidak memanfaatkan program secara optimal.
5. Pengawasan yang lemah dapat membuka peluang terjadi penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial.

Solusi:

1. Peningkatan akurasi data secara berkala, validasi data dan pemanfaatan teknologi.
2. Mengalokasikan anggaran yang cukup.
3. Peningkatan koordinasi dengan membuat tim koordinasi yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah terkait.
4. Peningkatan kesadaran dan etika.
5. Peningkatan implementasi dan pengawasan.

Rekomendasi/rencana tindak lanjut:

1. Pengumpulan data yang komprehensif dan melakukan analisa data yang mendalam.
2. Peningkatan anggaran dan pembiayaan yang cukup.
3. Peningkatan kerjasama dan koordinasi.
4. Peningkatan inovasi dan teknologi serta peningkatan kesadaran masyarakat.
5. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

Program Penanganan Bencana

Tabel 3.30
Pengukuran Indikator Kinerja Program Penanganan Bencana

Nama Program	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian tahun 2023	2024			2025			Target Akhir Benefit	Capaian Terhadap Target Akhir Benefit (%)
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Meningkatkan ketahanan sosial-kultural masyarakat	Program Penanganan Bencana	Pemenuhan Terepapertinya Ketahanan Dasar bagi Masyarakat/Penyusunan Kerkas Bencana	100	100	100	100	100	100	100	20.000	

Sumber: *Daftar Pelaksanaan Dinas Kab. Kotabaru 2023*

Indikator program ini ditunjukkan dalam upaya mengurangi kemungkinan risiko dan dampak negatif dari suatu bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Tingkat capaian pada tahun 2025 sebesar 100% dan berkategori Sangat Tinggi, jika dibandingkan dengan tahun 2024 mempunyai capaian yang sama yaitu 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun pelaksanaan Rencana sudah mencapai 20.000.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Program Penanganan Bencana Tahun 2024 dan 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Program Penanganan Bencana	Pemenuhan Terepapertinya Ketahanan Dasar bagi Masyarakat/Penyusunan Kerkas Bencana	Person	100	100	100	100	100	100
Pertidngan Sosial, Kerkas Bencana Aliran dan Sosial Kelangkaan/Itis	Diseminasi pengetahuan pertidngan dan jurnalis sosial bagi kerbas bencana alam dan sosial Kelangkaan/Itis	Person	100	100	100	100	100	100
Penyediaan Stokoran	terlak-Orang yang Menyediakan Peralatan 3rd Hand, Aliran Masa Tanggapan	Orang	900	900	100	1.100	1.100	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Dewan Pengawasan Keuangan Kabupaten/Kota							
Penyediaan Bantuan	Insentif Orang yang Mendapatkan Bantuan dan Kelengkapan Dokumentasi, termasuk pada Monev Tanggapan Dititik (Pengalaman) dan Pemasokan Keuangan Kabupaten/Kota	Orang				11	11	100

Sumber / Bidang Keuangan (Data Kiri) Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, Program Penanganan Bencana didukung oleh 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

1) Penyediaan Permukiman

Berupa kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian permukiman kepada korban bencana alam maupun bencana sosial. Tingkat capaian kinerja sub kegiatan ini terrealisasi 100% dengan target 1.350 orang.

Bukan dukung sub kegiatan ini sesuai sebagai berikut.

Tabel 3.32
Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Penerima Bantuan Permukiman Kabupaten Lebuk Tahun 2025

No.	Kecamatan	Banjir	Jenis Bencana		Kebuka- ran
			Tanah Longsor	Puting Belang	
1.	Banjarwan				23
2.	Bayah			30	
3.	Bojongmanguk		5	1	6
4.	Cibadak		10	39	49
5.	Cibeber		46	8	54
6.	Cigugurhlong		8		8
7.	Cihara			21	21
8.	Cipahi				10
9.	Cikalur		26	40	66
10.	Cikeles			35	35
11.	Cikidang		31		31

No.	Kecamatan	Banjir	Jenis Bencana		
			Tanah Longsor	Puting Beliung	Kebakaran
12.	Cimaga			12	16
13.	Ciputat		6	31	18
14.	Cirinten				
15.	Curugtung				7
16.	Gamingkeucana		14	42	
17.	Kalanganyar		9	46	13
18.	Luhakgedong	117	24	5	3
19.	Luaralamar		14	19	16
20.	Maja	30		33	8
21.	Malingging			30	9
22.	Muncang		4		2
23.	Pangpurangan		12		7
24.	Rangkabatang	20	7	68	28
25.	Sajira		5	42	
26.	Suhang		18		13
27.	Wanasalam	4		15	8
28.	Warunggunug		32	40	1
	Jumlah	191	299	597	263
				1.350	

Sumber: Bidang Penyelamatan, Dinas KEM, Lebak, 2024.

Visualisasi



1) Penyediaan Sandang

Bentuk kegiatan yang dilakukan pemberian pakaian untuk korban bencana alam dan bencana sosial dengan tingkat capaian kinerja terrealisasi 100% dari target 31 orang. Bukti dukung sob kegiatan ini sebagai berikut.

Tabel 3.33
Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Penyelidikan Sandang
Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Sandang									
		Celana Dakota Wanita	Celana Pendung Pria Daman	Celana Dakota Pria	Berat Wanita	Bantal	Kas Dakota Pria Daman	Kepala Bengk	Sandal Mutan- Laki- Laki	Sandal Jepit	Kas PUP Daman
1.	Banuwani										
2.	Banjir										
3.	Bintanegara										
4.	Cibadak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5.	Ciheras										
6.	Ciuruhbung										
7.	Ciura										
8.	Ciura										
9.	Ciurua	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
10.	Ciura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11.	Ciurung										
12.	Ciurung	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
13.	Ciurua										
14.	Ciurua										
15.	Ciuruhbung										
16.	Ciuruhbung										
17.	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18.	Luhakulung	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
19.	Luwatung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
20.	Mau	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
21.	Malungga										
22.	Miyana										
23.	Pandamagan										
24.	Rajapahang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
25.	Sasa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26.	Selang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27.	Wangalan										
28.	Wangganang	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Jumlah	31	31	31	31	31	31	31	31	31	

Sumber / Bidang Program: Dinas Rab. Lelak. 2025

Berdasarkan data tahun 2 sub kegiatan di atas, tingkat capaian kinerja kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/ Kota, terealisasi 100% dan berkategori Sangat Tinggi.

Permasalahannya:

1. Keterbatasan logistik, Dinas Sosial seringkali memiliki stok makanan yang terbatas untuk menghadapi bencana besar dikarenakan kurangnya anggaran yang dialokasikan.
2. Kondisi jalan yang rusak dapat menghambat pengiriman bantuan makanan ke daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau.

3. Data korban yang tidak akurat dapat menyebabkan distribusi makanan tidak merata, sehingga ada korban yang tidak mendapatkan bantuan.
4. Kurangnya koordinasi antar berbagai pihak dapat menyebabkan tumpang tindih atau kekosongan dalam penyaluran bantuan makanan.

Solusi:

1. Pendataan dan registrasi, proses cepat dan akurat untuk mengidentifikasi korban bencana, mencatat kebutuhan dan memastikan bantuan yang tepat usutan.
2. Bantuan kemanusiaan dalam bentuk pangan, sandang dan tempat tinggal sementara.
3. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanggulangan bencana.
4. Kerjasama antara pemerintah, organisasi kemanusiaan, relawan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Rekomendasi/rencana tindak lanjut:

1. Penyusunan rencana kontingensi yang komprehensif untuk menghadapi bencana alam dan bencana sosial, yang mencakup identifikasi risiko, perhitungan kebutuhan permukiman dan mekanisme penyaluran bantuan.
2. Data dan peta wilayah rawan bencana sebagai informasi untuk membantu dalam menentukan lokasi penyimpanan logistik.
3. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanggulangan bencana.
4. Kerjasama antara pemerintah, organisasi kemanusiaan, relawan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tabel 3.34
 Pengukuran Indikator Kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Sesuai Program	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian tahun 2023	2024			2025			Target Akhir Rencana	Capaian Terhadap Target Akhir Rencana (%)
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Mencapai	Program Penyelenggaraan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Persentase Penyelenggaraan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	11	11	11	11	100	100	100	100	20,00%

Sumber: Bidang Pelaksanaan Sosial, Dinas Kab. Labak, 2023

Indikator program ini digunakan untuk mengukur sejauh mana negara hadir dalam menghormati jasa para pahlawan melalui perawatan fisik tempat peristirahatannya. Tingkat capaian pada tahun 2025 sebesar 100% dan berkategori Sangat Tinggi, jika dibandingkan dengan target akhir tahun pelaksanaan Rencana sudah mencapai 20,00%.

Tabel 3.35
 Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Program Pemanangan Bencana Tahun 2024 dan 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Status	2024			2025		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Penyelenggaraan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Penuhi				100	100	100
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	Penuhi				100	100	100
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Jumlah Makam yang Terpelihara Penyelenggaraan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten Kota	Makam				1	1	100

Sumber: Bidang Pelaksanaan Sosial, Dinas Kab. Labak, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan tingkat capaian kinerja sub kegiatan realisasi 100% dengan target 1 makam orang.

Permasalahan:

1. Ketersediaan anggaran rutin, dimana alokasi dana seringkali hanya cukup untuk kebutuhan dasar, namun tidak mencukupi untuk rehabilitasi berat seperti perbaikan pagar atau pengecatan ulang.
2. TMP hanya memiliki satu petugas dengan beban kerja luas lahan yang besar, sehingga pemeliharaan tidak bisa dilakukan secara detail setiap hari.

Solusi:

1. Optimalisasi dana CSR untuk mendanai renovasi atau pengadaan fasilitas TMP.
2. Penyusunan kalender pemeliharaan preventif dengan mengalihkan pola kerja dari memperbaiki yang rusak menjadi perawatan rutin terjadwal.

Rekomendasi/rencana tindak lanjut:

1. Mendukung penambahan alokasi anggaran pemeliharaan melalui APBD atau CSR.
2. Membuat standar operasional prosedur yang baku mengenai pemeliharaan preventif TMP.

3.1.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas Sosial didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dinas Sosial Kabupaten Lebah dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dibeking dan setiap saaman didukung dengan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3.36
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Persentase Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (% capaian kinerja - % Penyerapan Anggaran)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Nilai SAKIP PD	0	95,00	-4,91
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90,54	95,00	-4,45
2	Meningkatnya Kesejahteraan sosial yang inklusif	Tingkat Kemiskinan	102,49	96,81	5,68
		Indeks Kesejahteraan Sosial	105,12	96,81	6,31

Berdasarkan tabel di atas, untuk mewujudkan sasaran 1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel di dukung oleh anggaran pada 1 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 4.574.117.536,00 dan teralisasi sebesar Rp 4.349.000.800,00 dengan penyerapan anggaran sebesar 95,09%, sehingga efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar -4,91% dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah sebesar -4,45%.

Untuk mendukung kinerja sasaran 2 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif di dukung oleh 5 program, yaitu 1) Program Peperbedaan Sosial, 2) Program Rehabilitasi Sosial, 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, 4) Program Penanganan Bencana, dan 5) Program Pengalihan Tuman Makam Pahlawan. Pada tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 7.204.172.700,00 dan teralisasi sebesar Rp 6.974.010.120,00 dengan penyerapan anggaran sebesar 96,81%, sehingga efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja pada indikator Tingkat Kemiskinan sebesar 5,68% dan indikator Indeks Kesejahteraan Sosial sebesar 6,31%.

3.2. Capaian Anggaran

Alokasi anggaran belanja tahun 2024 dan 2025, dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yaitu sasaran strategis 1 dan sasaran strategis 2. Rincian alokasi anggaran belanja berdasarkan sasaran strategis tersaji sebagai berikut.

Tabel 3.37
Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	2024			2025		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	4.312.433.714	4.301.994.133	99,76	4.514.317.098	4.449.009.820	98,58
2.	Meningkatnya Kesejahteraan sosial yang merata	3.142.434.188	3.011.074.688	95,82	3.264.172.500	3.079.810.520	94,35
Jumlah:		11.092.867.914	11.013.068.821	98,36	11.778.489.598	11.528.819.340	96,14

Sumber : JRP Badan Keuangan, Dinas Sosial, 2024 dan 2025

Untuk mengetahui tingkat efektifitas akuntabilitas keuangan dapat menggunakan rumus atau efektifitas berdasarkan Kepmendagri No. 690/700/327 tahun 2006. Pengukuran tersebut menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- (1) Sangat tidak efektif (0-40%)
- (2) Tidak efektif (40%-60%)
- (3) Cukup efektif (60%-80%)
- (4) Efektif (80%-100%)
- (5) Sangat efektif (>100%)

Penyempitan anggaran belanja tahun 2025 sebesar 96,14% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja keuangan berada pada kategori Efektif. Realisasi anggaran untuk sasaran 1 sebesar 98,58% berskategory efektif dan sasaran 2 sebesar 94,35% berskategory efektif. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, penyerapan anggaran belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,22% dari 97,36% pada tahun 2024 menjadi 96,14% pada tahun 2025.

Rincian target dan realisasi belanja yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.38
Target dan Realisasi Anggaran Belanja TA. 2024 dan 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2024			2025		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
	Unitas Pemerintahan Wilayah yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar/						
	Unitas Pemerintahan Bidang Sosial						
	Program Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar						
1.	Kategori/Kenaikan Perumahan	4.288.438.734	4.362.396.111	99,70	4.274.317.234	4.380.989.000	99,00
1.1.	Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Perumahan Daerah	21.209.000	20.944.000	98,29	20.232.000	19.188.000	94,79
1.1.1.	Perumahan Prorabat Daerah	22.023.000	10.430.000	47,19	12.302.000	24.168.000	19,60
1.1.2.	Perumahan Layar/ Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	10.210.000	10.514.000	103,11	17.930.000	172.191.000	96,04
2.	Adaptasi Kawasan Perumahan Daerah	3.445.637.870	3.396.047.547	98,58	3.495.192.556	3.429.462.000	98,14
2.1.	Pengadaan Alat dan Tangkapan Air	3.445.637.870	3.396.047.547	98,58	3.495.192.556	3.429.462.000	98,14
3.	Adaptasi Lokasi Perumahan Daerah	224.944.890	191.848.240	85,29	209.414.900	191.668.000	91,57
3.1.	Pengadaan Kompleks Perumahan	5.437.500	4.301.000	79,10	5.454.200	4.016.210	73,63
3.2.	Pengadaan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Perumahan				15.924.000	14.651.790	92,02
3.1.1.	Pengadaan Fasilitas Perumahan	5.210.000	5.000.000	96,16	12.421.000	11.356.000	91,42
3.1.2.	Pengadaan Fasilitas Perumahan	2.227.500	899.200	40,37	3.033.200	2.665.210	87,86
3.3.	Pengadaan Fasilitas Perumahan	1.198.000	1.210.000	101,00	1.120.000	1.210.000	108,04
3.4.	Pengadaan Fasilitas Perumahan	22.110.000	10.567.000	47,80	27.924.000	23.417.510	83,86
3.5.	Pengadaan Fasilitas Perumahan	177.540.000	124.087.000	69,90	34.050.000	17.189.000	50,47

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	2021			2022		
		Pago	Realisasi	%	Pago	Realisasi	%
4	Program Jasa Pelayanan Utama Pemerintahan Daerah	416.708.444	466.872.198	112,00	388.622.488	427.796.227	110,07
4.1	Program Jasa Konsultasi, Standar Dapat dan Lintas	118.749.000	130.862.710	110,28	132.614.200	144.696.110	109,20
4.2	Program Jasa Pelayanan Utama Eksternal	516.616.444	498.689.198	96,53	347.911.288	383.100.627	110,13
5	Pembinaan Bidang MSK Daerah Pelayanan Utama Pemerintahan Daerah	388.118.000	336.273.198	86,64	338.957.000	313.424.425	92,48
5.1	Program Jasa Pembinaan Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Daerah dan Masyarakat Daerah Tertentu	111.888.000	111.566.700	99,78	111.967.000	111.644.875	99,78
5.2	Program Jasa Perawatan dan Minor Lainnya	9.420.000	8.823.000	93,66	11.170.000	8.876.430	79,40
5.3	Program Jasa/Kelembagaan Gedung, Kantor dan Bangunan Lainnya	12.810.000	16.882.500	131,80	28.402.000	27.110.000	95,46
6	Program Pembinaan Sosial, Pengembangan Potensi Sektor Kesejahteraan Sosial Daerah	578.528.000	643.344.000	111,36	796.930.000	737.361.100	92,52
6.1	Kelompok Kerja Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kegiatan Kesejahteraan Keluarga/Berat Peningkatan Kemampuan Potensi Daerah	214.887.000	247.791.000	115,33	266.763.000	311.287.000	116,33
6.2	Kelompok Kerja Kegiatan Kesejahteraan Keluarga/Berat Peningkatan Kemampuan Potensi Daerah	169.921.000	173.562.000	102,15	119.020.000	119.476.900	100,39
6.3	Program Peningkatan Warga Negeri Bukan Terdak Kependudukan Peningkatan Warga Negeri Migrant Asing Tidak Kependudukan oleh TDA/Perwakilan di Daerah Kabupaten/Kota untuk Apresiasi dan Penghargaan dan Pelayanan Peningkatan Warga Negeri Migrant Kerabat Terak	9.000.000	6.433.700	71,49	9.000.000	5.281.000	58,78
6.4	Program Peningkatan Warga Negeri Bukan Terdak Kependudukan Peningkatan Warga Negeri Migrant Asing Tidak Kependudukan oleh TDA/Perwakilan di Daerah Kabupaten/Kota untuk Apresiasi dan Penghargaan dan Pelayanan Peningkatan Warga Negeri Migrant Kerabat Terak	9.000.000	6.433.700	71,49	9.000.000	5.281.000	58,78

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	2021			2022		
		Pago	Realisasi	%	Pago	Realisasi	%
	Kelompok dan Fiskal Definitif dan Definitif Kategori/Status untuk Dipertanggungjawabkan ke Dinas/Kepolisian Area						
IV.	Program Rehabilitasi Sosial	343.444.400	476.773.800	91,28	479.294.000	471.591.420	94,28
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Peningkatan Disabilitas Fisik/Orak, Anak Terlantar, Jantung Gagal Terlantar, serta Gangguan Perilaku di Luar Panti Sosial	222.438.000	279.444.700	84,51	279.000.000	279.444.700	89,91
1.1.	Pembinaan Perilaku Panti-sosial Samping	171.420.000	196.170.700	96,91	99.021.000	98.299.000	98,99
1.2.	Panti-sosial Anak Binaan Pembinaan Perilaku Fiskal, Moral, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	22.790.000	76,49	99.999.000	92.999.400	96,09
1.3.	Pembinaan Layanan Keluarga	22.230.000	-	0,00	12.070.000	6.691.000	95,40
1.4.	Pembinaan Pelayanan Pembinaan Keluarga				4.700.000	1.100.000	51,31
2.	Rehabilitasi Sosial Peningkatan Monev Kecerdasan Sosial (PMKS) Layanan Binaan Kelas HPV/000 dan NAPZA di Luar Panti Sosial	200.536.400	279.493.100	94,21	200.714.000	292.277.500	97,99
2.1.	Pembinaan Layanan Dasar dan Peningkatan				4.044.000	4.701.000	97,11
2.2.	Pembinaan Perilaku Pembinaan Samping	110.134.700	96.786.441	96,95	110.199.100	106.792.200	96,90
2.3.	Pembinaan Perilaku Fiskal, Moral, Spiritual dan Sosial	20.230.000	23.402.000	94,19	20.000.000	21.011.456	99,23
2.4.	Pembinaan Perilaku Sosial secara Holistik Peningkatan Monev Kecerdasan Sosial (PMKS) Layanan Binaan Kelas HPV/000 dan NAPZA	6.000.000	6.073.000	99,79	4.320.000	2.970.000	92,10
2.5.	Pembinaan Layanan Keluarga	170.000.000	170.000.000	100,00	152.700.000	152.422.900	99,86
V.	Program Peningkatan dan Jaminan Sosial	2.744.433.700	2.616.461.200	95,40	2.748.348.700	2.616.461.000	97,74
1.	Peningkatan Data Pokok Miliaris Cakupan Dasar Kepercayaan	2.742.411.700	2.616.461.200	95,42	2.748.348.700	2.616.461.000	97,74
1.1.	Peningkatan Pokok Miliaris Cakupan Dasar Kepercayaan	75.000.000	70.991.700	94,19	103.661.000	102.999.000	99,44
1.2.	Peningkatan Data Pokok Miliaris Cakupan Dasar Subsistem	1.140.000	1.757.200	95,09	1.140.700	-	0,00

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2024			2025		
		Pago	Realisasi	%	Pago	Realisasi	%
1.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.678.251.000	1.662.973.000	99,10	1.382.911.000	1.366.411.000	97,99
V.6	Program Penguatan Berencana	286.000.000	279.447.200	97,71	286.000.000	277.423.000	96,99
1.6	Peningkatan Sosial Ketersediaan Hasil Air Bersih Kabupaten/Kota	250.000.000	239.447.200	95,77	250.000.000	237.623.000	95,07
1.8	Peningkatan Perumahan	300.000.000	279.447.200	93,15	250.000.000	230.419.000	92,17
1.9	Peningkatan Sanitasi				20.000.000	21.000.000	105,00
VII.	Program Pengelolaan Timun Miskin Kabupaten				11.713.000	11.100.000	94,78
2.	Peningkatan Timun Miskin Kabupaten Nasional				11.713.000	11.100.000	94,78
2.2	Peningkatan Timun Miskin Kabupaten Nasional Kabupaten/Kota				11.713.000	11.100.000	94,78
	Jumlah	11.492.898.704	11.383.563.701	99,06	11.778.096.234	11.223.918.900	96,14

Sumber : Aka-Bagan Keuangan, Januari 2024 dan 2025

Berdasarkan tabel 3.38, pada tahun 2025 program, kegiatan dan sub kegiatan secara keseluruhan capaian serapan anggaran sebesar 96,14%. Nilai capaian keuangan tertinggi pada sub kegiatan Pengelolaan Timun Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu sebesar 94,00%. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Upaya tindak lanjut untuk mempertahankan tingkat capaian kinerja keuangan adalah:

1. Pelaksanaan evaluasi penerapan anggaran sub kegiatan dilakukan secara berkala setiap 1 bulan sekali dan berkala lumpat.
2. Menyusun perencanaan anggaran yang lebih efektif dan berdaya guna.
3. Memberikan teguran kepada penanggung jawab sub kegiatan untuk melaksanakan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai tindakan dalam menunjang capaian kinerja dinas.

Perbandingan capaian realisasi anggaran selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.6
Perkembangan Target dan Penyerapan Anggaran Belanja Tahun 2021-2022



Sumber: Sub Bagian Keuangan, Dinas Koth Leryu, 2021-2022

3.3. Capaian Kinerja Lain

Dinas Sosial Kabupaten Leryu mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang merupakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Sosial, yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas tertantar di luar parti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak tertantar di luar parti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia tertantar di luar parti.
4. Rehabilitasi sosial dasar tunas sosial kebunus gelandangan dan pengemis di luar parti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Adapun evaluasi SPM Bidang Sosial tercapai sebagai berikut:

Tabel 3.39
Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 dan 2025

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target dan Realisasi		2025	
			Target SPM	Realisasi SPM	Target SPM	Realisasi SPM
1.	Kebijakan Sosial Dalam Penyelenggaraan Disabilitas Terpadu di Luar Panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terpadu yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	95,33%	100%	95,00%
2.	Kebijakan Sosial Dalam Aspek Terpadu di Luar Panti	Persentase (%) Anak Terpadu yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	99,00%
3.	Kebijakan Sosial Dalam Layanan Usaha Terpadu di Luar Panti	Persentase (%) Layanan Usaha Terpadu yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	93,77%	100%	99,00%
4.	Kebijakan Sosial Dalam Tindak Sosial Kemasyarakatan, Gefendangan dan Kegiatan di Luar Panti	Persentase (%) Gefendangan dan Kegiatan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggapi dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten Kota	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten Kota	100%	100%	100%	100%
Tingkat Capaian			100%	99,21%	100%	99,52

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial & Welfare Pelayanan, Dinas Kab. Lahat, 2024-2025

BAB 4

Penutup

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lebak tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Lebak tahun 2025 memiliki 4 indikator kinerja utama sebagai tolak ukur kinerja. Indikator sasaran 1 terdiri dari 2 indikator, yaitu 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan tingkat capaian sebesar 9,00%, dan 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan tingkat capaian sebesar 99,54%. Indikator sasaran 2 terdiri dari 2 indikator, yaitu 1) Tingkat Kemiskinan dengan tingkat capaian sebesar 102,49%, dan 2) Indeks Kesejahteraan Sosial dengan tingkat capaian sebesar 103,12%.
2. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2025 mencapai 76,29%. Keberhasilan ketiga indikator kinerja utama tidak lepas dari adanya kerjasama yang baik antara internal Dinas Sosial Kabupaten Lebak, serta terjalinnya hubungan baik dengan stakeholder yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan. Kemampuan SDM yang dimiliki turut menjadi faktor pendukung keberhasilan.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam upaya memperbaiki kinerja sebagai berikut:

1. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan pelayanan sehingga kebutuhan dasar, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial PPKS dapat terpenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemeliharaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pelaksanaan nilai-nilai budaya.
3. Memaksimalkan peran tenaga, instansi pemerintah dan melibatkan masyarakat di dalam dunia bisnis dalam hal penanganan bencana sosial dari pra, saat dan pasc terjadinya bencana.

PI. KEPALA DEWAS SOSIAL KAB. LEBIAK

